



# LAPORAN KINERJA



## DIREKTORAT SMA

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK  
USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN  
PENDIDIKAN MENENGAH  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI.

# 2021





# LAPORAN KINERJA



## DIREKTORAT SMA

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK  
USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN  
PENDIDIKAN MENENGAH  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI.

# 2021

# Pernyataan Telah Direviu

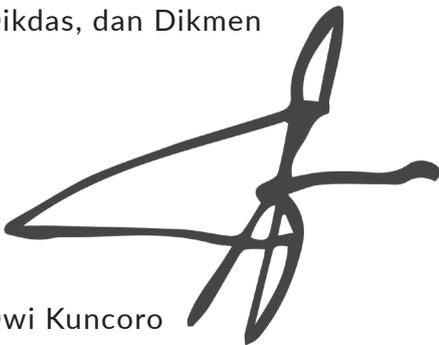
Kami telah mereviu Laporan Kinerja Direktorat SMA Tahun 2021. Laporan Kinerja ini disusun sebagai pertanggungjawaban dalam pencapaian pelaksanaan program/kegiatan/anggaran di Direktorat SMA. Reviu ini bertujuan untuk menyajikan Laporan Kinerja yang akurat, andal, dan valid.

Jakarta, 27 Januari 2021

Tim Review Laporan Kinerja:

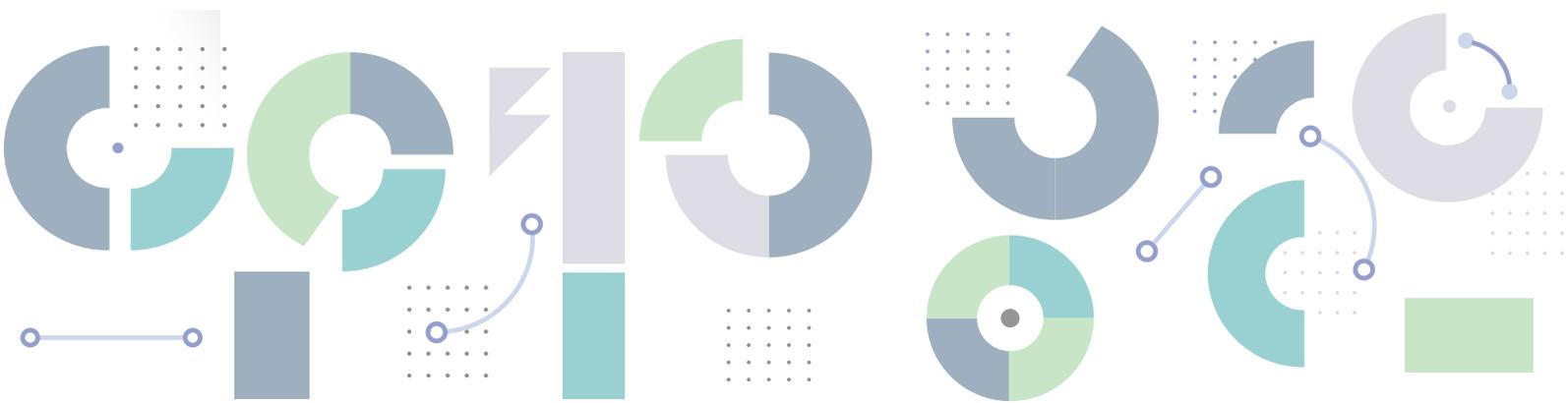
Penyelia Fungsi Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran Setditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen

Dwi Kuncoro



Ketua Satuan Pengawas Internal (SPI) Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen

Hayun Kusuma



# Pernyataan Telah Direviu

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Direktorat SMA Tahun 2021. Laporan Kinerja ini disusun sebagai pertanggungjawaban dalam pencapaian pelaksanaan program/kegiatan/anggaran di Direktorat SMA. Reviu ini bertujuan untuk menyajikan Laporan Kinerja yang akurat, andal, dan valid.

Jakarta, 26 Januari 2021  
Tim Review Laporan Kinerja  
Direktorat SMA:

Kasubbag Tata Usaha,  
Direktorat SMA



Ekawati

Ketua Satuan Pengawas Internal (SPI)  
Direktorat SMA



Nurul Mahfudi

Penyusun Laporan Keuangan

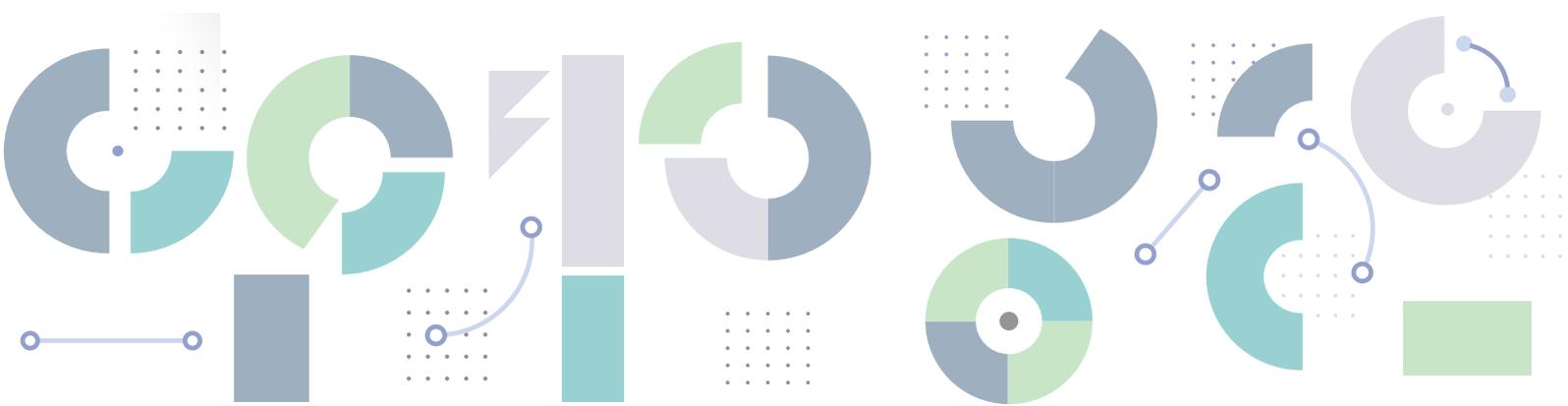


I Wayan Budi Darmawan

Analisis Perencanaan, Evaluasi dan  
Pelaporan



Irfan Harry Prasetya





# DAFTAR ISI

Kata Pengantar *ii*

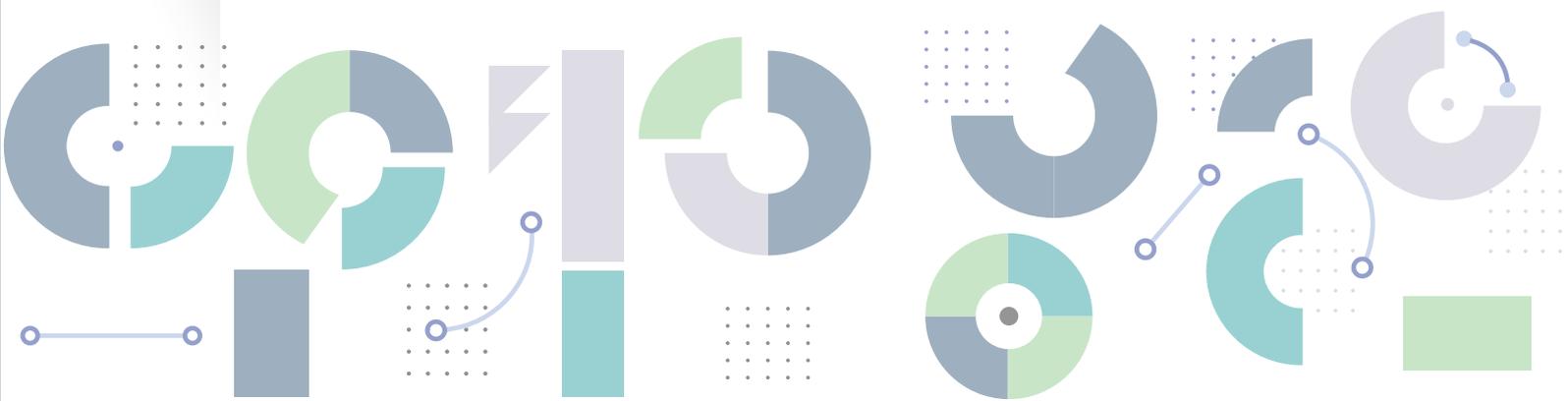
BAB 1 : Pendahuluan **11**

BAB 2 : Perencanaan Kerja **16**

BAB 3 : Akuntabilitas Kinerja **21**

BAB 4 : Penutup **63**

Lampiran **68**



# Kata Pengantar

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat - Nya "Laporan Kinerja Direktorat SMA Tahun 2021" dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada pimpinan dan juga kepada publik atas pelaksanaan program dan kegiatan dan penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang berkualitas, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Tahun 2021, Direktorat SMA menetapkan 2 Sasaran Kegiatan dan 10 Indikator Kinerja Kegiatan yang dituangkan dalam perjanjian kinerja antara Direktur SMA dengan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. Laporan Kinerja Direktorat SMA tahun 2021 ini diharapkan dapat memberikan gambaran objektif tentang kinerja yang dihasilkan Direktorat SMA serta rencana aksi ke depan untuk mengatasi permasalahan dan kendala yang telah diidentifikasi selama tahun 2021.

Secara umum, Laporan Kinerja ini memuat target dan anggaran, capaian, analisis hasil capaian, dan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja di tahun 2022. Semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat bagi pemangku kepentingan serta menjadi bahan evaluasi bagi Direktorat SMA untuk dapat dijadikan bahan dalam menyusun program dan kebijakan di tahun 2022.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Kinerja Direktorat SMA Tahun 2021.

Jakarta, 31 Januari 2022

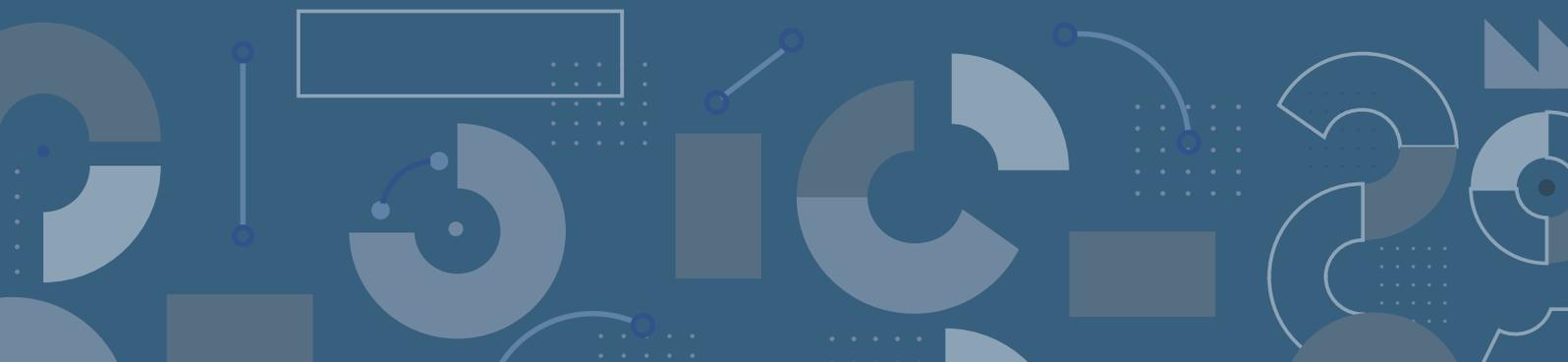
Direktur Sekolah Menengah Atas



Dr. Suhartono Arham, M.Si

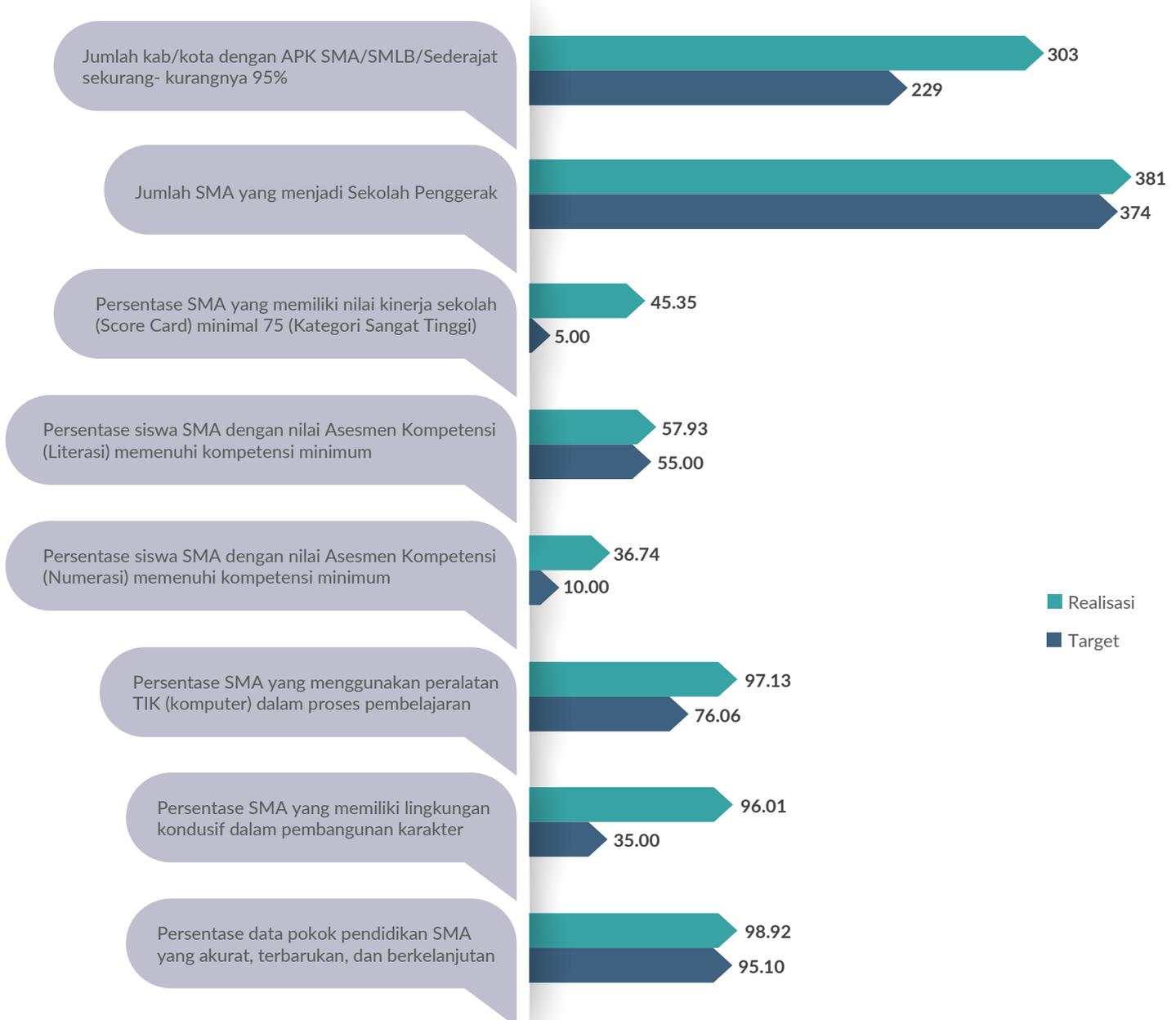
NIP 196610131992031003

“Laporan Kinerja ini merupakan bentuk **pertanggungjawaban** kepada publik atas pelaksanaan program dan kegiatan dan penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang **berkualitas, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel**”



# Ikhtisar Eksekutif

## SK 1 - Tersedianya Layanan Pendidikan SMA yang Merata dan Berkualitas



Pada sasaran kegiatan 1 (satu) yakni tersedianya layanan pendidikan yang merata dan berkualitas, terdapat 8 (delapan) indikator kinerja kegiatan (IKK) yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Berdasarkan data yang diperoleh seluruh IKK memperoleh capaian lebih dari 100%. Capaian tersebut tidak terlepas dari program dan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat SMA. Walaupun terdapat hambatan dan kendala selama tahun 2021, berbagai antisipasi telah dilakukan sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik.

## SK 2 – Menguatnya tata Kelola dan sistem pengendalian manajemen di lingkungan Ditjen Paud Dikdas Dikmen

Rata-rata predikat SAKIP  
Satker minimal BB

Target :

**A**

Realisasi :

**A**

Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKAKL masing-masing Satker minimal 80

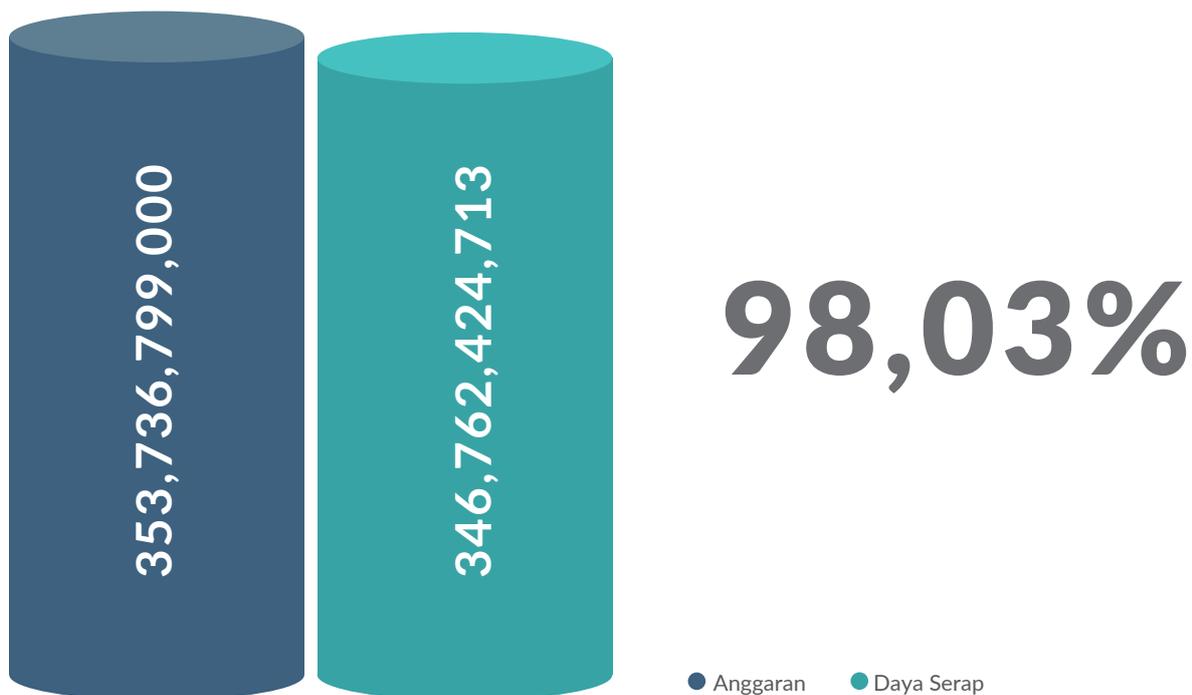
Target :

**82**

Realisasi :

**88,34**

### Penyerapan Anggaran



Pada sasaran kegiatan 2 (dua) yakni menguatnya tata kelola dan sistem pengendalian manajemen di lingkungan Ditjen Paud, Dikdas, dan Dikmen terdapat 2 (dua) indikator kinerja kegiatan (IKK) yakni predikat SAKIP dan Nilai Kinerja Anggaran (NKA). Terkait dengan SAKIP, secara predikat, perolehan yang dicapai masih sama yakni predikat A namun terjadi peningkatan nilai dibandingkan tahun 2020. Untuk nilai kinerja anggaran, capaian yang diperoleh melebihi target yang telah ditetapkan. Kedua capaian tersebut tidak lepas dari monitoring pelaksanaan program dan anggaran di lingkungan Direktorat SMA yang dilakukan setiap bulan, triwulan, dan semester. Monitoring dilakukan agar permasalahan yang timbul dapat segera teridentifikasi dan terpecahkan sehingga tidak mengganggu kinerja Direktorat SMA.

## PERMASALAHAN UMUM

- ▶ Masih diperlukan penguatan pemahaman pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat terhadap kebijakan dan program Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi seperti kebijakan merdeka belajar, program sekolah penggerak, fleksibilitas penggunaan dana BOS, pembelajaran paradigma baru, hingga tujuan dan konsep dasar dari pelaksanaan Asesmen Nasional.
- ▶ Potensi terjadinya *learning loss* akibat pandemic Covid 19 yang menyebabkan kualitas pembelajaran menjadi tidak optimal.
- ▶ Masih diperlukan penguatan tata Kelola pendidikan sehingga mempengaruhi hasil pembelajaran peserta didik. Salah satu yang perlu diperhatikan adalah pemahaman terkait kebijakan baru bagi seluruh Sumber Daya Manusia di lingkungan Direktorat SMA.
- ▶ Meningkatnya tingkat anak putus sekolah dan rentan putus sekolah baik akibat pandemi Covid-19 maupun faktor lainnya.
- ▶ Perubahan pola pelaksanaan kegiatan dari tatap muka menjadi campuran antara luring dan daring yang belum optimal, sehingga informasi yang ingin disampaikan kepada *stakeholder* Pendidikan menjadi belum terpenuhi.
- ▶ Terkait dengan masalah akses, berdasarkan data pada Dapodik terdapat 873 kecamatan atau setara 12% dari total kecamatan yang belum memiliki sekolah menengah baik SMA maupun SMK. Kondisi ini dapat mengganggu pelaksanaan program PPDB yang memiliki tujuan untuk memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh peserta didik untuk memperoleh pendidikan.
- ▶ Terindikasi angka melanjutkan ke perguruan tinggi bagi peserta didik di jenjang SMA masih belum optimal, mengingat tujuan utama dr pendidikan di SMA adalah untuk melanjutkan ke perguruan tinggi.
- ▶ Masih diperlukan peningkatan kualitas pembelajaran. Kondisi ini didasarkan pada hasil yang diperoleh dari PISA terkait literasi dan numerasi.
- ▶ Masih diperlukan peningkatan kualitas sarana prasarana untuk mendukung pembelajaran khususnya bagi satuan pendidikan yang terdampak bencana.
- ▶ Masih terjadinya perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi di tingkat satuan pendidikan baik melalui verbal, tindakan, maupun melalui media sosial.

## LANGKAH ANTISIPASI

- ▶ Fasilitasi dan advokasi untuk peningkatan pemahaman pemerintah daerah, sekolah dan masyarakat dengan menggunakan berbagai metode seperti sosialisasi tatap muka, penggunaan media, hingga pemanfaatan media sosial.
- ▶ Fasilitasi dan advokasi kepada pemerintah daerah dengan tujuan untuk meningkatkan kontribusi pemerintah daerah terhadap pelaksanaan pembelajaran selama masa pandemi dengan memperhatikan kondisi dan kebutuhan sekolah.
- ▶ Mewujudkan terciptanya kerja sama dan kolaborasi yang erat antar unit kerja di lingkungan Kemendibudristek dan pemangku kepentingan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, masyarakat, dan keluarga melalui penguatan tata Kelola Pendidikan yang partisipatif, akuntabel, dan transparan.
- ▶ Fasilitasi dan advokasi kepada pemerintah daerah dan sekolah untuk mendorong terciptanya inovasi yang berkontribusi untuk mengatasi anak putus sekolah dan rentan putus sekolah melalui kolaborasi bersama antara pemerintah daerah, sekolah, dan *stakeholder* pendidikan lainnya.
- ▶ Melakukan internalisasi terhadap seluruh Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan Direktorat SMA terkait kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Melalui internalisasi tersebut, diharapkan pemahaman dan kompetensi SDM dapat meningkat sehingga menunjang kinerja Direktorat SMA.
- ▶ Mengembangkan inovasi program untuk membantu meningkatkan karakter kewirausahaan, sehingga bagi peserta didik yang belum dapat melanjutkan ke perguruan tinggi memiliki karakter yang dapat digunakan untuk meneruskan perjuangannya.
- ▶ Mengembangkan bahan-bahan yang bersifat *microlearning* kepada sekolah dan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran bagi peserta didik khususnya pada masa pandemi Covid 19.
- ▶ Fasilitasi kepada sekolah untuk dapat melaksanakan program anti perundungan atau yang dikenal dengan nama *Roots*. Melalui fasilitasi tersebut, diharapkan sekolah dapat terstimulus untuk terus menekan angka perundungan, intoleransi, dan kekerasan seksual yang mungkin saja terjadi di sekolah.

# BAB 1

## PENDAHULUAN

- » Gambaran umum
- » Dasar hukum
- » Tugas dan fungsi
- » Isu strategis



# Gambaran Umum



Berdasarkan Permendikbud Nomor 28 Tahun 2021, Direktorat SMA dipimpin oleh Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. Direktorat SMA terdiri atas Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat SMA, maka Direktur dan Kasubbag Tata Usaha, dibantu oleh empat koordinator bidang. Pembagian bidang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Direktorat SMA yakni bidang tata kelola, peserta didik, penilaian dan sarana prasarana. Berikut ini adalah nama Direktur, Kasubbag Tata Usaha, dan para koordinator bidang.

Direktur SMA	Suhartono Arham
Kasubbag Tata Usaha	Ekawati
Koordinator Bidang Tata Kelola	Winner Jihad Akbar
Sub Koordinator Bidang Tata Kelola	Wiwiet Heriyanto Irfan Harry Prasetya
Koordinator Bidang Penilaian	Hastuti Mustikaningsih
Sub Koordinator Bidang Penilaian	Rina Imayanti Junus Simangunsong
Koordinator Bidang Peserta Didik	Juandanilsyah
Sub Koordinator Bidang Peserta Didik	Alex Firngadi Fathnuryati Hidayah
Koordinator Bidang Sarana Prasarana	Dhany Hamiddan Khoir
Sub Koordinator Bidang Sarana Prasarana	Untung Wismono Windu Astuti

# Dasar Hukum

- ▶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- ▶ Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- ▶ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- ▶ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja
- ▶ Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kemendikbud
- ▶ Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- ▶ Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2020-2024
- ▶ Rencana Strategis Direktorat SMA Tahun 2020-2024



# Tugas dan Fungsi

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Pasal 109 tugas Direktorat Sekolah Menengah Atas sebagai berikut.

## Tugas :

**Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sekolah menengah atas dan pendidikan layanan khusus pada sekolah menengah atas.**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 103 tersebut, Direktorat Sekolah Menengah Atas menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut:

## Fungsi :

1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang peserta didik, pembelajaran, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada sekolah menengah atas dan pendidikan layanan khusus pada sekolah menengah atas;
2. penyusunan norma, prosedur, dan kriteria di bidang peserta didik, pembelajaran, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada sekolah menengah atas dan pendidikan layanan khusus pada sekolah menengah atas
3. pelaksanaan kebijakan penjaminan mutu di bidang peserta didik, pembelajaran, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada sekolah menengah atas dan pendidikan layanan khusus pada sekolah menengah atas;
4. pelaksanaan kebijakan di bidang standar peserta didik, pembelajaran, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada sekolah menengah atas dan pendidikan layanan khusus pada sekolah menengah atas
5. fasilitasi penyelenggaraan di bidang peserta didik, pembelajaran, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada sekolah menengah atas dan pendidikan layanan khusus pada sekolah menengah atas
6. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peserta didik, pembelajaran, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada sekolah menengah atas dan pendidikan layanan khusus pada sekolah menengah atas
7. penyiapan perumusan pemberian izin penyelenggaraan sekolah menengah atas yang diselenggarakan perwakilan negara asing atau lembaga asing dan sekolah menengah atas kerja sama yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan asing dengan lembaga pendidikan Indonesia
8. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang sekolah menengah atas
9. pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat

# Isu Strategis

Potensi terjadinya *learning loss* akibat pandemic covid 19 yang berdampak pada rendahnya hasil belajar peserta didik.

Pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas yang masih belum optimal dari aspek pembelajaran maupun penerapan protokol Kesehatan.

Masih perlu ditingkatkan pemahaman dari pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat terhadap kebijakan dan program Kemendikbudristek seperti kebijakan merdeka belajar, program sekolah penggerak, fleksibilitas penggunaan dana BOS, pembelajaran paradigma baru, hingga tujuan dan konsep dasar dari pelaksanaan Asesmen Nasional.

Penguatan tata kelola pendidikan untuk peningkatan hasil pembelajaran peserta didik.

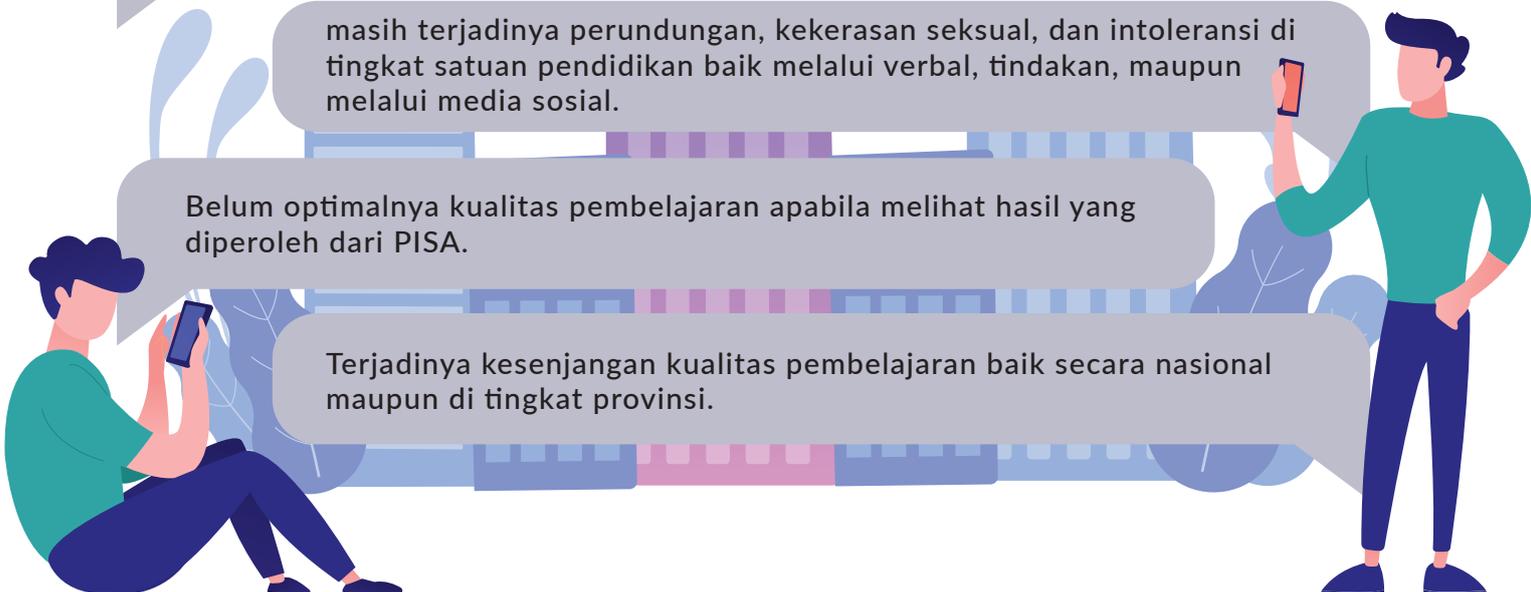
Meningkatnya tingkat anak putus sekolah dan rentan putus sekolah baik akibat pandemi Covid-19 maupun faktor lainnya.

Pelaksanaan pembelajaran paradigma baru bagi sekolah penggerak yang belum optimal.

masih terjadinya perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi di tingkat satuan pendidikan baik melalui verbal, tindakan, maupun melalui media sosial.

Belum optimalnya kualitas pembelajaran apabila melihat hasil yang diperoleh dari PISA.

Terjadinya kesenjangan kualitas pembelajaran baik secara nasional maupun di tingkat provinsi.



# BAB 2

## PERENCANAAN KINERJA

- » Visi, Misi, Dan Tujuan Strategis
- » Rencana Kinerja Jangka Menengah
- » Perencanaan Kinerja Awal
- » Perencanaan Kinerja Akhir



# Visi, Misi, & Tujuan Strategis

## Visi

Mewujudkan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebhinekaan global.

## Misi

**M1**

Mewujudkan pendidikan SMA yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi.

**M2**

Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan SMA.

## Tujuan Strategis

Meningkatnya perluasan akses afirmasi jenjang Pendidikan SMA serta percepatan Wajib Belajar 12 Tahun.

1

Meningkatnya kualitas pembelajaran pada jenjang SMA.

3

Terwujudnya pengelolaan Pendidikan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel, pada jenjang SMA.

5

Meningkatnya mutu satuan Pendidikan pada jenjang SMA

2

Meningkatnya karakter Peserta Didik pada jenjang SMA.

4

# Rencana Kinerja

## Rencana Kinerja Jangka Menengah

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
IKK	Jumlah kabupaten/kota dengan APK SMA/MA/SMLB sekurang-kurangnya 95%	Kab/kota	219	229	239	249	259
IKK	Jumlah SMA yang menjadi Sekolah Penggerak	Sekolah	-	650	1.300	1.950	2.600
IKK	Persentase SMA yang memiliki nilai kinerja sekolah (Score Card) minimal 75 (Kategori Sangat Tinggi)	%	-	5.0	10.0	15.0	20.0
IKK	Persentase Siswa SMA dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi Kompetensi Minimum	%	53.0	55.0	58.0	60.0	63.0
IKK	Persentase Siswa SMA dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi Kompetensi Minimum	%	26.5	27.4	28.3	29.2	30.1
IKK	Persentase SMA yang menggunakan peralatan TIK (komputer) dalam proses pembelajaran	%	73.84	76.06	78.34	80.69	83.11
IKK	Persentase SMA yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	%	30	35	40	45	50
IKK	Persentase data pokok pendidikan SMA yang akurat, terbaru, dan berkelanjutan	%	95.10	95.20	95.30	95.40	95.50

# Perencanaan Kinerja Awal

#	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2021
1	[SK 1] Tersedianya layanan pendidikan SMA yang merata dan berkualitas	[IKK 1.1] Jumlah kabupaten/kota dengan APK SMA/MA/SMLB sekurang-kurangnya 95%	229
		[IKK 1.2] Jumlah SMA yang menjadi Sekolah Penggerak	374
		[IKK 1.3] Persentase SMA yang memiliki nilai kinerja sekolah (scorecard) minimal 75 (kategori Sangat Tinggi)	5
		[IKK 1.4] Persentase siswa SMA dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum	55
		[IKK 1.5] Persentase siswa SMA dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	10
		[IKK 1.6] Persentase SMA yang menggunakan peralatan TIK (komputer) dalam proses pembelajaran	76,06
		[IKK 1.7] Persentase SMA yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	35
		[IKK 1.8] Persentase data pokok pendidikan SMA yang akurat, terbaru dan berkelanjutan	95,1
2	[SK 2] Menguatnya tata kelola dan sistem pengendalian manajemen di lingkungan Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen	[IKK 2.1] Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	A
		[IKK 2.2] Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKAKL masing-masing Satker minimal 80	82
No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	5627	Pembinaan Sekolah Menengah Atas	Rp259.431.198.000
2	4462	Peningkatan Kualitas Pembelajaran Sekolah Menengah Atas	Rp112.749.942.000
3	2005	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	Rp29.853.462.000
<b>TOTAL</b>			<b>Rp402.034.602.000</b>

# Perencanaan Kinerja Akhir

Perubahan yang dilakukan hanya terkait perubahan anggaran akibat adanya efisiensi anggaran yang diperuntukan untuk penanganan Covid-19 dan juga realokasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan program prioritas di lingkungan Direktorat SMA.

#	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2021
1	[SK 1] Tersedianya layanan pendidikan SMA yang merata dan berkualitas	[IKK 1.1] Jumlah kab/kota dengan APK SMA/MA/SMLB sekurang-kurangnya 95%	229
		[IKK 1.2] Jumlah SMA yang menjadi Sekolah Penggerak	374
		[IKK 1.3] Persentase SMA yang memiliki nilai kinerja sekolah (scorecard) minimal 75 (kategori Sangat Tinggi)	5
		[IKK 1.4] Persentase siswa SMA dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum	55
		[IKK 1.5] Persentase siswa SMA dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	10
		[IKK 1.6] Persentase SMA yang menggunakan peralatan TIK (komputer) dalam proses pembelajaran	76,06
		[IKK 1.7] Persentase SMA yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	35
		[IKK 1.8] Persentase data pokok pendidikan SMA yang akurat, terbaru dan berkelanjutan	95,1
2	[SK 2] Menguatnya tata kelola dan sistem pengendalian manajemen di lingkungan Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen	[IKK 2.1] Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	A
		[IKK 2.2] Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKAKL masing-masing Satker minimal 80	82

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	5627	Pembinaan Sekolah Menengah Atas	Rp211.690.054.000
2	4462	Peningkatan Kualitas Pembelajaran Sekolah Menengah Atas	Rp116.938.529.000
3	2005	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	Rp25.108.216.000
<b>TOTAL</b>			<b>Rp353.736.799.000</b>

# BAB 3

## AKUNTABILITAS KINERJA

» Capaian Kinerja

» Realisasi Anggaran



# Capaian Kinerja

Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat SMA tercantum pada Rencana Strategis Direktorat SMA 2020 - 2024 dan tertuang di dalam Perjanjian Kinerja Direktur SMA Tahun 2021. Pada tahun 2021 terdapat 2 (dua) Sasaran Kegiatan dan 10 Indikator Kinerja Kegiatan. Secara umum, seluruh Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan telah tercapai di tahun 2021. Terdapat beberapa Indikator Kinerja Kegiatan yang capaiannya melebihi 100%. Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan.

## SK 1 - Tersedianya Layanan Pendidikan SMA yang Merata dan Berkualitas

Jumlah kab/kota dengan APK SMA/SMLB/Sederajat sekurang- kurangnya 95%



Jumlah SMA yang menjadi Sekolah Penggerak



Persentase SMA yang memiliki nilai kinerja sekolah (Score Card) minimal 75 (Kategori Sangat Tinggi)



Persentase siswa SMA dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum



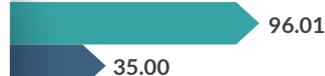
Persentase siswa SMA dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum



Persentase SMA yang menggunakan peralatan TIK (komputer) dalam proses pembelajaran



Persentase SMA yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter



Persentase data pokok pendidikan SMA yang akurat, terbaru, dan berkelanjutan



■ Realisasi  
■ Target

Pada sasaran kegiatan 1 (satu) yakni tersedianya layanan pendidikan yang merata dan berkualitas, terdapat 8 (delapan) indikator kinerja kegiatan (IKK) yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Berdasarkan data yang diperoleh seluruh IKK memperoleh capaian lebih dari 100%. Capaian tersebut tidak terlepas dari program dan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat SMA. Walaupun terdapat hambatan dan kendala selama tahun 2021, berbagai antisipasi telah dilakukan sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik.

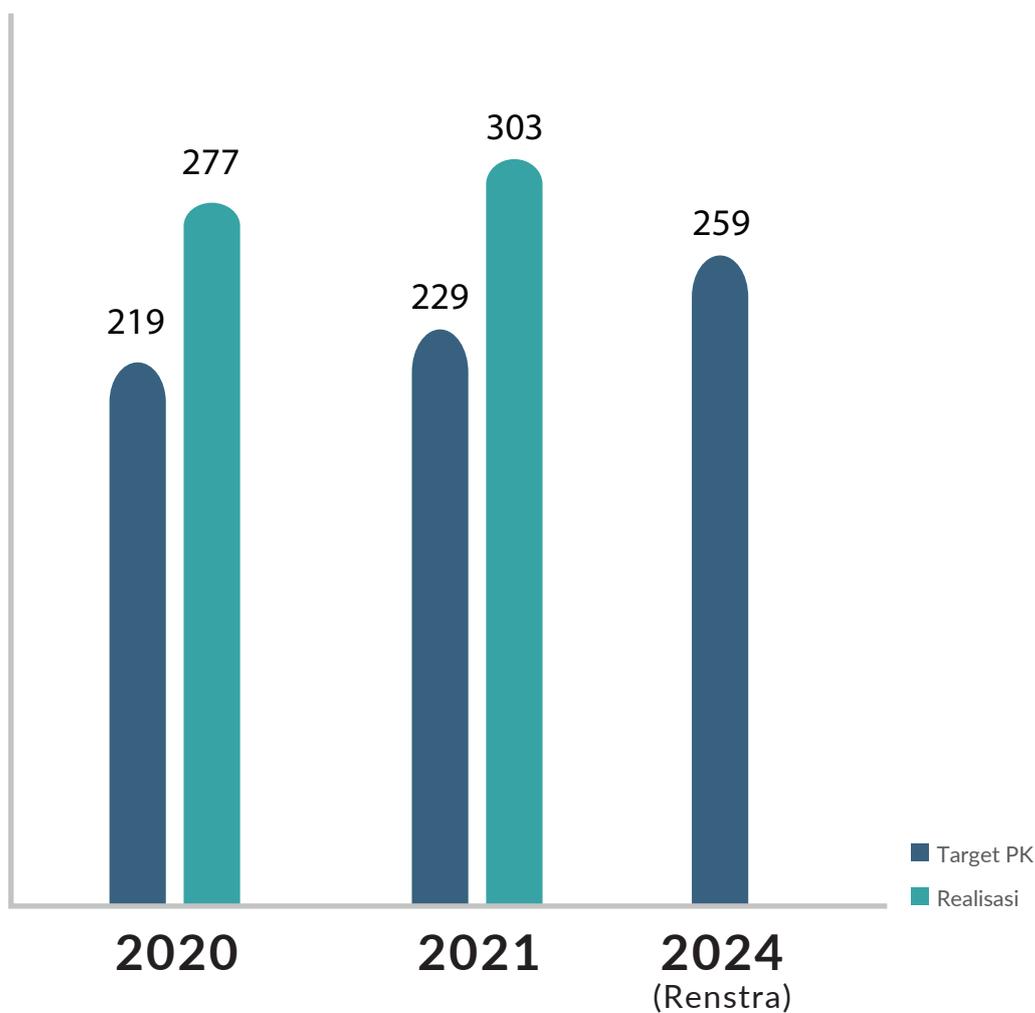
Sesuai Sasaran Kegiatan pada Direktorat SMA, kualitas layanan pendidikan SMA pada tahun 2021 menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya. Hal ini, antara lain berdampak pada meningkatnya jumlah peserta didik yang memenuhi batas minimum capaian AKM Literasi dan Numerasi, yang ditetapkan. Selain itu, terjadi peningkatan signifikan jumlah Satuan Pendidikan SMA yang memanfaatkan TIK dalam proses pembelajaran.

Selain peningkatan kualitas pembelajaran, pemerataan akses pada SMA juga mengalami perbaikan dari tahun sebelumnya dimana terdapat penambahan 26 Kab/Kota yang APK nya 95% atau lebih, dibandingkan dengan tahun 2020, sebagaimana terlihat pada capaian Indikator Sasaran. Untuk lingkungan kondusif, capaian yang dihasilkan telah melebihi target yang ditetapkan.

Namun yang perlu mendapatkan perhatian adalah, metode penghitungan untuk capaian literasi, numerasi, dan lingkungan kondusif menggunakan metode yang berbeda dengan tahun 2020.

## IKK. Jumlah kab/kota dengan APK SMA/SMLB/Sederajat sekurang-kurangnya 95%

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/SMLB Sederajat merupakan persentase perbandingan jumlah penduduk yang bersekolah pada SMA/SMK/MA/SMLB /sederajat, negeri maupun swasta) terhadap jumlah penduduk usia 16-18 Tahun.



Capaian pada tahun 2021 adalah 303 kabupaten/kota atau setara dengan 132,31% dari target yang telah ditetapkan. Jumlah inipun telah melampaui target pada akhir Renstra 2024 yakni 259 kabupaten/kota atau sebesar 116,98%. Selain itu apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2020, terjadi peningkatan sebanyak 26 kabupaten/kota.

## Sebaran Kabupaten/Kota dengan APK SMA/SMLB/Sederajat sekurang-kurangnya 95%

No.	Provinsi	Kabupaten/Kota		
		>95%	<95%	Total
1	Aceh	14	9	23
2	Bali	6	3	9
3	Bangka Belitung	2	5	7
4	Banten	2	6	8
5	Bengkulu	7	3	10
6	D.I. Yogyakarta	5	-	5
7	D.K.I Jakarta	4	2	6
8	Gorontalo	4	2	6
9	Jambi	7	4	11
10	Jawa Barat	11	16	27
11	Jawa Tengah	14	21	35
12	Jawa Timur	26	12	38
13	Kalimantan Barat	8	6	14
14	Kalimantan Selatan	6	7	13
15	Kalimantan Tengah	6	8	14
16	Kalimantan Timur	6	4	10
17	Kalimantan Utara	3	2	5
18	Kepulauan Riau	5	2	7
19	Lampung	5	10	15
20	Maluku	8	3	11
21	Maluku Utara	9	1	10
22	Nusa Tenggara Barat	10	-	10
23	Nusa Tenggara Timur	17	5	22
24	Papua	1	28	29
25	Papua Barat	5	8	13
26	Riau	4	8	12
27	Sulawesi Barat	4	2	6
28	Sulawesi Selatan	17	7	24
29	Sulawesi Tengah	9	4	13
30	Sulawesi Tenggara	16	1	17
31	Sulawesi Utara	13	2	15
32	Sumatera Barat	16	3	19
33	Sumatera Selatan	8	9	17
34	Sumatera Utara	25	8	33
Jumlah		303	211	514

Jika melihat rata-rata nasional maka APK SMA/SMLB/Sederajat berada pada angka 97,06, maka terdapat 236 kabupaten/kota yang masih berada dibawah rata-rata nasional. Kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian khususnya bagi pemerintah daerah untuk dapat bersinergis dengan pemerintah pusat dalam rangka meningkatkan APK di daerah tersebut.

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian kinerja tersebut, sebagai berikut:

- Koordinasi pelaksanaan program transfer daerah baik DAK Fisik maupun Non Fisik melalui pemerintah daerah untuk memastikan manfaat dari program tersebut dirasakan oleh satuan Pendidikan khususnya bagi peserta didik.
- Pengembangan kajian dan Piloting program afirmasi yakni penanganan anak rentan putus sekolah yang dilakukan di 43 satuan Pendidikan.
- Melakukan koordinasi secara terus menerus baik di internal Kemendikbudristek, lintas Kementerian, Pemerintah Daerah dan para stakeholder Pendidikan untuk mengurangi angka putus sekolah dan rentan putus sekolah.
- Melakukan fasilitasi melalui pengembangan bahan advokasi dalam bentuk film pendek yang disampaikan melalui media sosial Direktorat SMA.

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target tersebut, sebagai berikut:

- Pelaksanaan program transfer daerah baik DAK Fisik dan Non Fisik mengalami kendala teknis seperti metode kontraktual pada DAK Fisik dan juga terkait rekening penyaluran pada DAK Non Fisik.
- Belum semua daerah memiliki *awareness* yang sama terkait dengan pentingnya penanganan anak rentan putus sekolah.

Langkah antisipasi yang diambil untuk mengatasi permasalahan atau hambatan yang dihadapi agar target indikator kinerja dapat tercapai, diantaranya adalah:

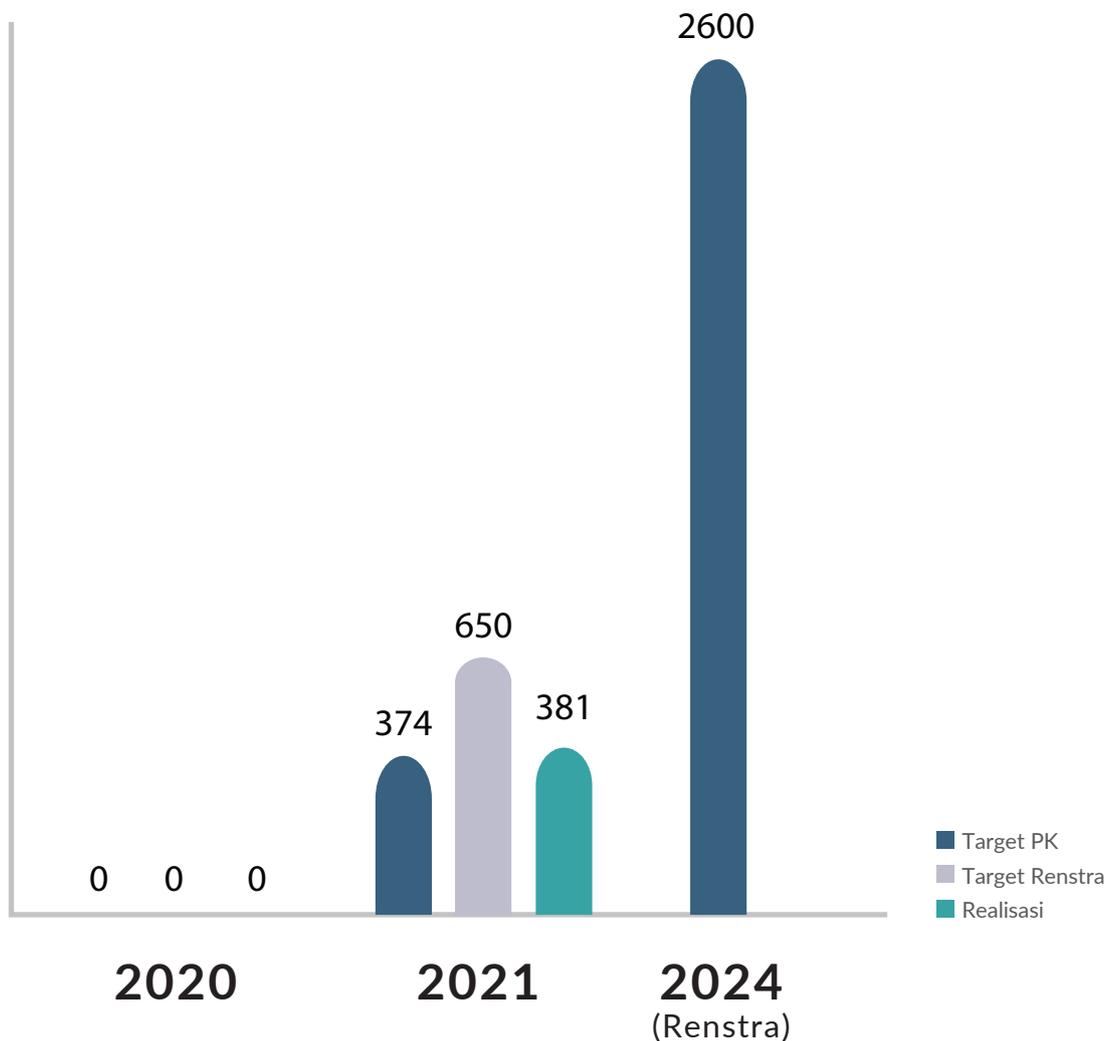
- Melakukan koordinasi yang intensif antar internal Kemendikbudristek, lintas kementerian dan pemerintah daerah dalam mengawal pelaksanaan program transfer daerah baik DAK Fisik maupun Non Fisik.
- Mengembangkan bahan advokasi terkait pentingnya penanganan anak rentan putus sekolah sebagai upaya menjaga APK untuk tidak turun.



Bahan Advokasi Penunjang IKK Jumlah  
Kabupaten/Kota dengan APK Minimal 95%

## IKK. Jumlah SMA yang Menjadi Sekolah Penggerak

Jumlah SMA yang menjadi sekolah penggerak berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor 6586/C/HK/00/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Dan Pendidikan Menengah Nomor 6555/C/Hk.00/2021 Tentang Penetapan Satuan Pendidikan Pelaksana Program Sekolah Penggerak beserta perubahannya, telah ditetapkan sejumlah 381 SMA pelaksana program Sekolah Penggerak.



Apabila melihat target pada renstra, untuk tahun 2021 seharusnya adalah 650 sekolah. Namun berdasarkan reviu renstra yang telah dilakukan, Direktorat SMA melakukan penyesuaian dengan memperhitungkan jumlah pendaftar sekolah penggerak di tahun 2021. Melihat jumlah pendaftar dan berdasarkan hasil koordinasi lintas unit utama, maka target Perjanjian Kinerja diturunkan menjadi 374.

## Sebaran SMA yang Menjadi Sekolah Penggerak di 34 Provinsi

No.	Provinsi	Jumlah SP
1	Aceh	8
2	Bali	5
3	Bangka Belitung	16
4	Banten	5
5	Bengkulu	6
6	D.I. Yogyakarta	13
7	D.K.I Jakarta	3
8	Gorontalo	6
9	Jambi	48
10	Jawa Barat	25
11	Jawa Tengah	40
12	Jawa Timur	9
13	Kalimantan Barat	7
14	Kalimantan Selatan	9
15	Kalimantan Tengah	3
16	Kalimantan Timur	3
17	Kalimantan Utara	1
18	Kepulauan Riau	4
19	Lampung	15
20	Maluku	9
21	Maluku Utara	1
22	Nusa Tenggara Barat	10
23	Nusa Tenggara Timur	16
24	Papua	7
25	Papua Barat	2
26	Riau	13
27	Sulawesi Barat	2
28	Sulawesi Selatan	16
29	Sulawesi Tengah	7
30	Sulawesi Tenggara	9
31	Sulawesi Utara	5
32	Sumatera Barat	10
33	Sumatera Selatan	17
34	Sumatera Utara	31
Jumlah		381

Capaian pada tahun 2021 sebanyak 381 sekolah. Jumlah tersebut melebihi target yang telah ditetapkan yakni 374 sekolah. Kesesuaian target dengan realisasi sebesar 101,87%. Apabila dibandingkan dengan target renstra maka ketercapaiannya sebesar 14,65%.

Direktorat SMA melakukan advokasi dan fasilitasi dalam pelaksanaan Sekolah Penggerak dengan sasaran tim Pokja Manajemen Operasional (PMO) Sekolah Penggerak pada tingkat pusat dan daerah, Sekolah Penggerak dan Pemerintah Daerah. Adapun advokasi dan fasilitasi yang dilakukan sebagai berikut:

1. Internalisasi kepada tim PMO Sekolah penggerak pada tingkat pusat. Internalisasi dilakukan agar tim PMO memiliki kompetensi dalam melakukan pendampingan sesuai dengan pembagian tugas yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan koordinasi PMO Pusat dan PMO Daerah sebagai wadah untuk mengetahui progress pelaksanaan, kendala dan tindak lanjut terhadap permasalahan yang ditemukan.
3. Pendampingan kepada Sekolah Penggerak terkait lima intervensi utama yakni pendampingan konsultatif dan asimetris, penguatan sumber daya manusia sekolah, pembelajaran paradigma baru, perencanaan berbasis data, dan digitalisasi sekolah.
4. Pengadaan buku teks utama pembelajaran bagi kelas X di Sekolah Penggerak bekerjasama dengan Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan.
5. Penyediaan layanan *helpdesk* melalui grup Whatsapp untuk mempermudah komunikasi antara sekolah dengan direktorat dalam hal progress dan kendala yang dihadapi.

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target tersebut, sebagai berikut:

1. Kebijakan sekolah penggerak merupakan kebijakan yang dinamis. Tahun 2021 merupakan tahun pertama pelaksanaan program dan melibatkan banyak pihak baik lintas eselon 1 maupun lintas kementerian dan pemerintah daerah sehingga pelaksanaan koordinasi dan pemahaman bersama terkait konsep Sekolah Penggerak masih belum optimal yang mengakibatkan pendampingan belum optimal.
2. Pemahaman sekolah dan pemerintah daerah belum optimal sehingga pelaksanaan masih mengalami kendala. Salah satu pemahaman yang masih salah adalah konsep pelaksanaan Sekolah Penggerak yang tidak lagi transaksional dan peran beberapa pemerintah daerah yang masih minim untuk mendukung keberhasilan Sekolah Penggerak.

Langkah antisipasi yang diambil untuk mengatasi permasalahan atau hambatan yang dihadapi agar target indikator kinerja dapat tercapai, diantaranya adalah:

1. Meningkatkan intensitas koordinasi antar lintas unit eselon 1. Koordinasi dilakukan karena pendampingan Sekolah Penggerak dilakukan lintas unit eselon 1 di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Peningkatan kompetensi dan profesional guru, serta seleksi kepala sekolah dilakukan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Pengembangan Kurikulum baik Pembelajaran maupun Asesmen dilakukan Badan Standar, Asesmen, dan Kebijakan Pendidikan, Pengembangan Digitalisasi Sekolah oleh Pusat Data dan Informasi, koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan pendampingan ke sekolah dilakukan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.
2. Pendampingan secara berkala kepada pemerintah daerah, tim PMO pusat dan daerah, dan sekolah penggerak terkait konsep dasar sekolah penggerak serta lima intervensi utama kepada Sekolah Penggerak, yaitu pendampingan konsultatif dan asimetris, penguatan SDM sekolah, pembelajaran paradigma baru, perencanaan berbasis data, dan digitalisasi sekolah.

## IKK. Persentase SMA yang memiliki nilai kinerja sekolah (Score Card) minimal 75 (Kategori Sangat Tinggi)

No.	Provinsi	Jumlah Sekolah	
		Nilai PMP > 6	Total Responden PMP
1	Aceh	165	477
2	Bali	54	140
3	Bangka Belitung	28	62
4	Banten	195	388
5	Bengkulu	32	118
6	D.I. Yogyakarta	80	164
7	D.K.I Jakarta	292	453
8	Gorontalo	23	52
9	Jambi	54	118
10	Jawa Barat	716	1.250
11	Jawa Tengah	314	682
12	Jawa Timur	578	1.053
13	Kalimantan Barat	116	317
14	Kalimantan Selatan	56	154
15	Kalimantan Tengah	61	177
16	Kalimantan Timur	65	172
17	Kalimantan Utara	15	46
18	Kepulauan Riau	49	113
19	Lampung	169	423
20	Maluku	96	201
21	Maluku Utara	41	152
22	Nusa Tenggara Barat	122	259
23	Nusa Tenggara Timur	117	327
24	Papua	42	153
25	Papua Barat	26	76
26	Riau	144	373
27	Sulawesi Barat	19	64
28	Sulawesi Selatan	231	557
29	Sulawesi Tengah	51	182
30	Sulawesi Tenggara	97	241
31	Sulawesi Utara	70	147
32	Sumatera Barat	115	303
33	Sumatera Selatan	274	525
34	Sumatera Utara	375	845
Jumlah		4.882	10.764

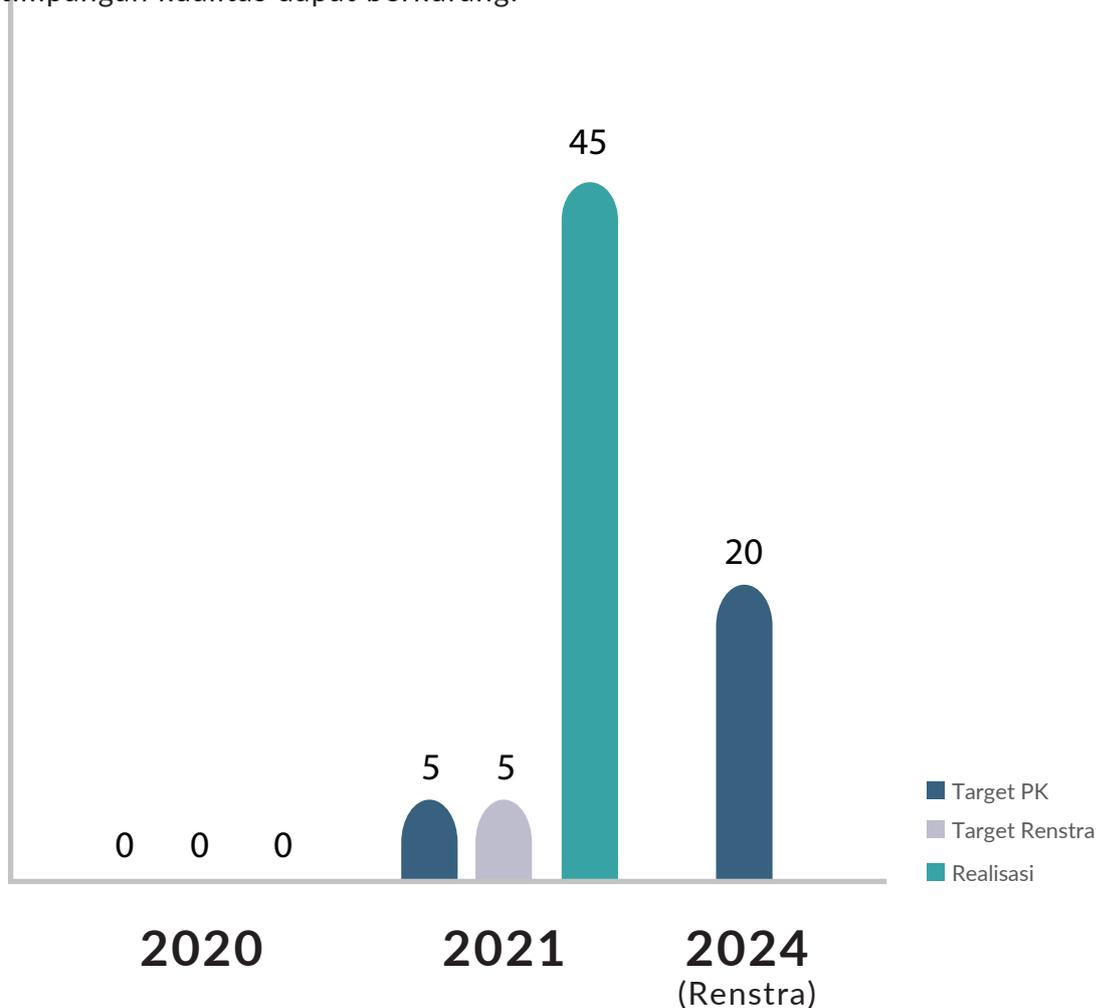
Berdasarkan definisi operasional, Scorecard yang diterapkan di satuan pendidikan adalah sistem penilaian kinerja yang komprehensif (perencanaan, keuangan, pelayanan pendidikan, tatakelola) meliputi indikator: Asesmen Kompetensi Minimal (AKM) dan Survei Karakter, rapor mutu, kompetensi guru, dan tata kelola sekolah.

Namun, seiring dengan perkembangan kebijakan istilah *scorecard* berganti menjadi raport dan profil Pendidikan. Selain itu, tidak hanya istilah namun metode perhitungan dan indikator di dalamnya mengalami perubahan. Raport dan profil Pendidikan tersebut akan muncul pada aplikasi Raport Pendidikan yang akan diluncurkan pada Maret 2022. Pada tahun 2021, nilai untuk profil dan raport Pendidikan belum dapat diperoleh sehingga diperlukan penyesuaian terhadap capaian IKK ini.

Perhitungan capaian IKK Persentase SMA yang memiliki nilai kinerja sekolah (Score Card) minimal 75 (Kategori Sangat Tinggi) dilakukan dengan menggunakan nilai yang terdapat pada raport mutu sekolah. Nilai raport mutu diperoleh melalui instrument Penjaminan Mutu Pendidikan. Di dalam raport mutu terdapat instrumen yang berisi ketercapaian 8 (delapan) standar nasional Pendidikan di sekolah. Rentang nilai pada raport mutu antara 1 - 7. Berdasarkan koordinasi yang telah dilakukan nilai minimum adalah 6.

Terdapat 4.882 sekolah dari total 10.764 sekolah yang mengisi instrument PMP memperoleh diatas atau sama dengan 6 atau sebesar 45,35%. Persentase tersebut melebihi target yang telah ditetapkan yakni 5%. Kesesuaian realisasi dengan target adalah 907%.

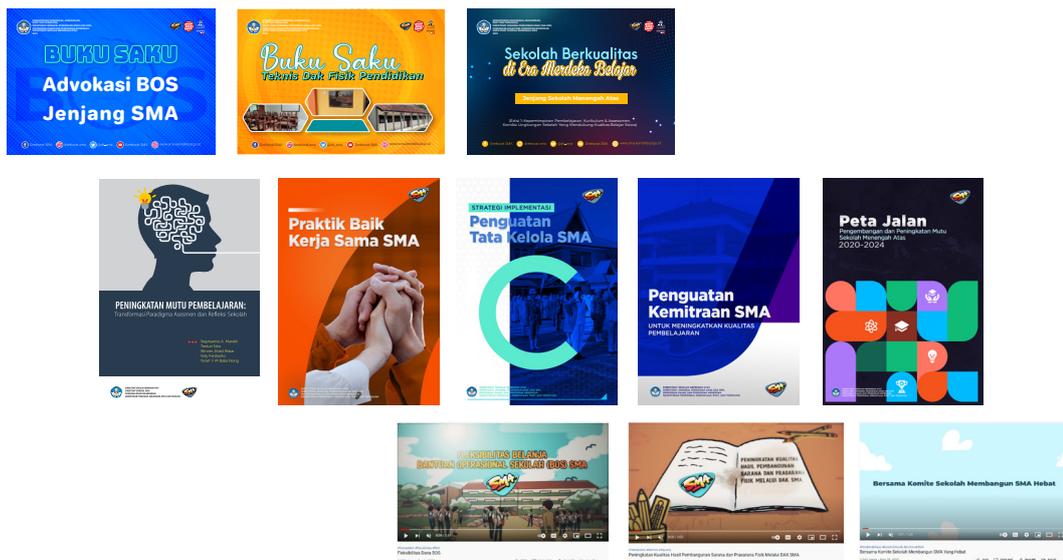
Capaian pada IKK ini, disertai dengan kondisi lain dimana terdapat gap yang cukup tinggi antara nilai terendah dan tertinggi yang diperoleh sekolah. Nilai terendah yang diperoleh adalah 3,13 sedangkan nilai tertinggi yang diperoleh adalah 7. Terdapat perbedaan sebesar 3,86 poin. Hal ini menandakan masih terjadinya ketimpangan kualitas sekolah. Kondisi ini perlu menjadi perhatian agar ketimpangan kualitas dapat berkurang.



Target IKK Persentase SMA yang memiliki nilai kinerja sekolah (Score Card) minimal 75 (Kategori Sangat Tinggi) dimulai dari tahun 2021. Target yang tercantum pada Renstra untuk tahun 2021 adalah 5 dan target akhir yang ditetapkan pada tahun 2024 adalah 20. Capaian 2021 sudah melebihi target yang ditetapkan pada akhir renstra. Namun yang perlu menjadi catatan adalah metode perhitungan yang berbeda sehingga hasil yang diperoleh pada tahun 2021 tidak dapat dibandingkan dengan hasil yang diharapkan pada tahun 2024. Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian agar pada tahun 2022, perhitungan capaian IKK sudah disesuaikan dengan kebijakan terkait profil dan raport Pendidikan.

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian kinerja tersebut, sebagai berikut:

1. Fasilitasi kepala sekolah dan pemerintah daerah dalam bentuk penyediaan bahan-bahan advokasi terkait peningkatan mutu di sekolah seperti infografis, videografis, dan buku referensi yang dapat diakses melalui media sosial dan website Direktorat SMA.
2. Melakukan sosialisasi terkait dengan perencanaan berbasis data melalui forum jaringan teman sekolah yang terdiri dari perwakilan dinas, mkps, dan mkks di masing-masing provinsi.
3. Melakukan koordinasi kepada pemerintah daerah untuk memastikan sekolah memahami konsep fleksibilitas dana BOS untuk menunjang peningkatan mutu pembelajaran di sekolah.



Bahan Advokasi Penunjang IKK SMA yang Memiliki Nilai Kinerja Sekolah (Score Card) Minimal 75 (Kategori Sangat Tinggi)

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target tersebut, sebagai berikut:

1. Kurangnya ketertarikan pemerintah daerah dan sekolah dalam mengakses bahan advokasi yang telah disediakan oleh Direktorat SMA.
2. Belum optimalnya penyebaran bahan advokasi yang telah dikembangkan oleh Direktorat SMA.
3. Terlambatnya nilai yang diperoleh dari profil dan raport pendidikan yang menyebabkan metode perhitungan berbeda dengan definisi operasional yang telah dikeluarkan.

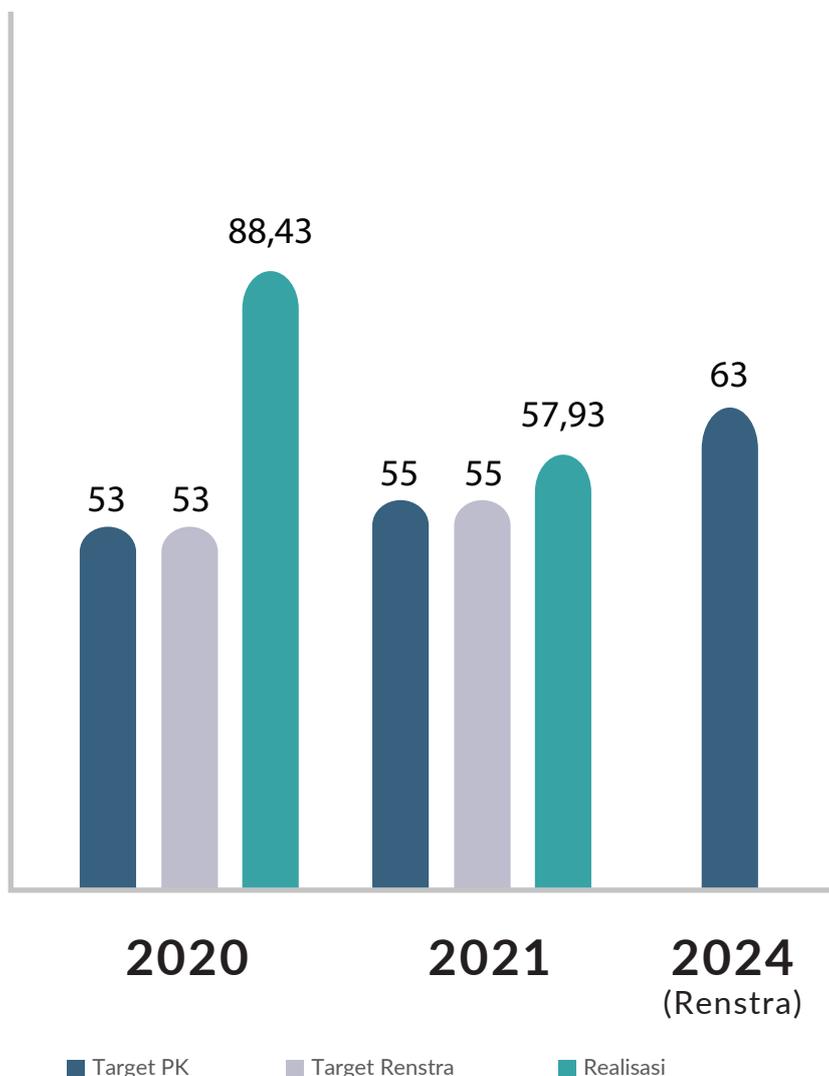
Langkah antisipasi yang diambil untuk mengatasi permasalahan atau hambatan yang dihadapi agar target indikator kinerja dapat tercapai, diantaranya adalah:

1. Direktorat SMA berkoordinasi dengan Eselon I yakni Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah terkait metode perhitungan yang digunakan pada IKK ini.
2. Direktorat SMA mengoptimalkan penggunaan webinar untuk menyebarkan konten advokasi yang telah dikembangkan.
3. Direktorat SMA melakukan identifikasi terhadap bahan yang dibutuhkan oleh sekolah untuk dapat digunakan dalam proses peningkatan mutu Pendidikan di sekolahnya.

## IKK. Persentase Siswa SMA dengan Nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) Memenuhi Kompetensi Minimum

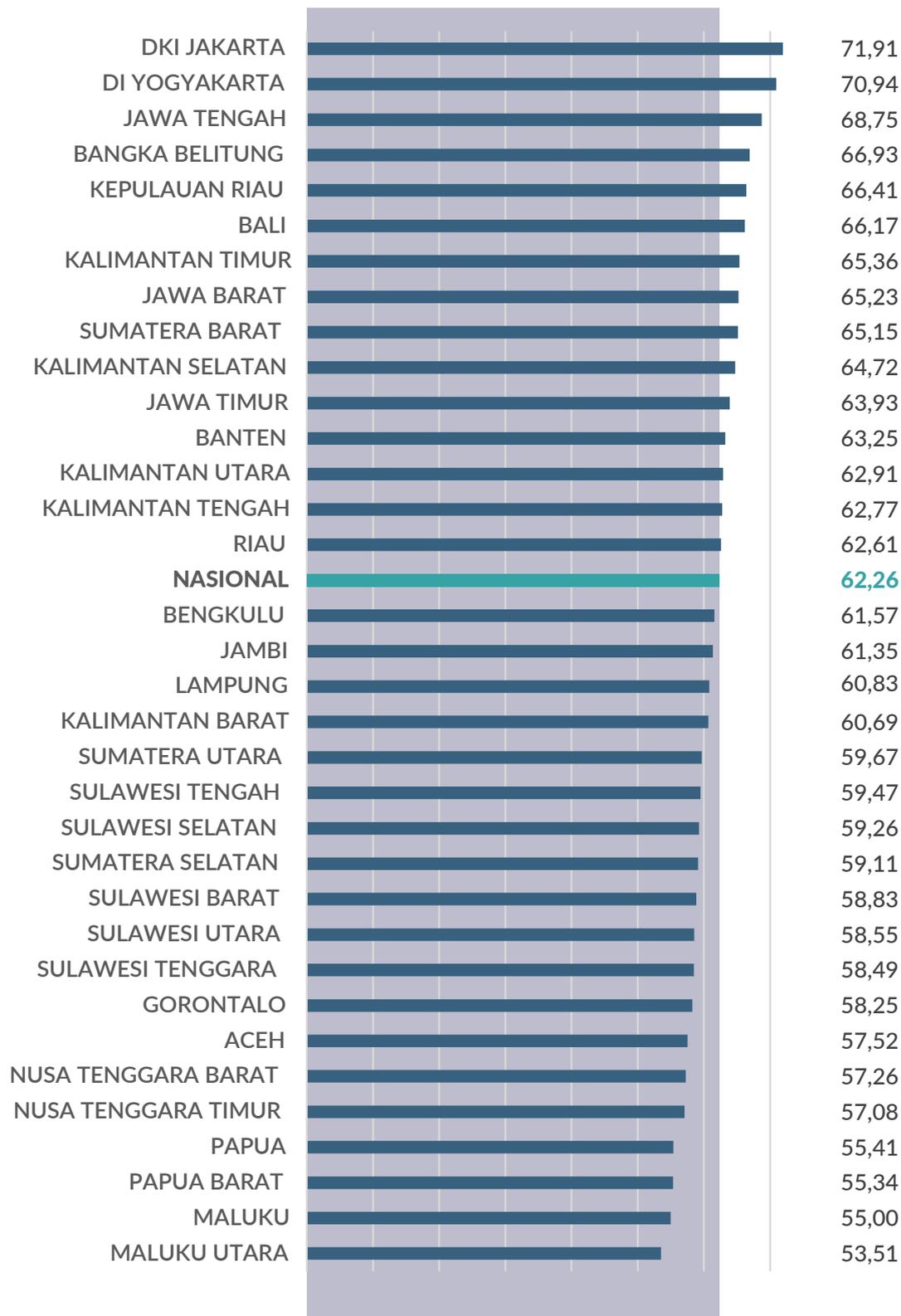
**A**sesmen Kompetensi Minimum adalah jenis asesmen yang dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengetahui kompetensi minimal siswa dalam bidang literasi, numerasi, dan karakter. Saat ini untuk literasi terdapat empat kategori utama yang digunakan dalam mengelompokkan hasil asesmen kompetensi minimum siswa yakni perlu intervensi, dasar, cakap, dan mahir. Yang dimaksud dengan kompetensi minimum ada pada kategori cakap dan mahir. Sedangkan yang dibawah kompetensi minimum adalah perlu intervensi dan dasar.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Standar Kompetensi dan Asesmen Pendidikan, terdapat 57,93% yang termasuk dalam kategori memenuhi kompetensi minimum. Capaian tersebut melebihi target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja yakni 55%. Kesesuaian target dengan realisasi sebesar 105,33%

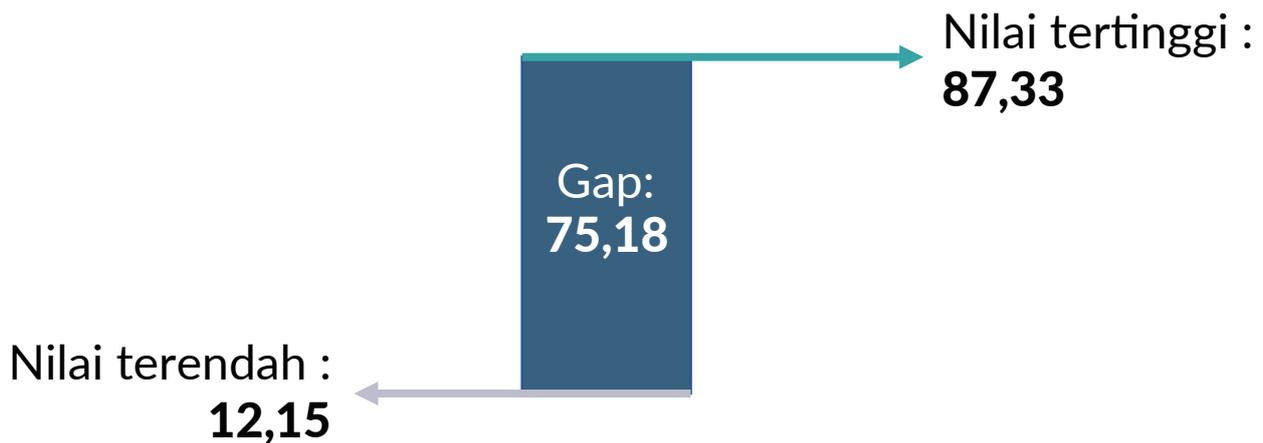


Jika melihat trend capaian IKK pada tahun 2020 dan 2021, terjadi penurunan capaian IKK dari capaian 2020 yakni 88,43 menjadi 57,93 di tahun 2021. Namun yang perlu menjadi catatan adalah pada tahun 2020, capaian IKK menggunakan nilai Ujian Nasional sedangkan pada tahun 2021 capaian IKK sudah menggunakan nilai pada Asesmen Kompetensi Minimum. Capaian yang diperoleh pada tahun 2021 melebihi target yang ditetapkan. Apabila capaian 2021 dibandingkan dengan target di 2024, maka ketercapaian saat ini adalah 91,95%.

## Rata - Rata Nilai Literasi



Berdasarkan data yang diperoleh, rata-rata nasional untuk literasi adalah 62,24. Walaupun secara target kinerja tercapai namun masih banyak provinsi yang perlu mendapatkan perhatian baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hal tersebut terlihat dari disparitas yang cukup tinggi.



Terdapat gap yang cukup signifikan yakni 75,18 dari nilai tertinggi dan nilai terendah yang diperoleh peserta didik. Kondisi ini menunjukkan adanya disparitas yang cukup tinggi terkait kompetensi literasi di Indonesia. Kondisi perlu mendapatkan perhatian pemerintah pusat dan daerah.

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian kinerja tersebut, sebagai berikut:

1. Pendampingan dan supervisi persiapan serta pelaksanaan Asesmen Nasional
2. Diskusi dan koordinasi pelaksanaan pembelajaran dan asesmen yang melibatkan perwakilan dinas Pendidikan daerah, sekolah, dan praktisi Pendidikan. Diskusi dan koordinasi dilakukan untuk melakukan identifikasi dan pencarian solusi agar proses pembelajaran dan asesmen di sekolah dapat berjalan dengan baik. Adapun tema yang dibahas yakni pembelajaran tatap muka, panduan konversi nilai, bahan strategi penguatan literasi dan numerasi dan inspirasi diversifikasi kurikulum di SMA.
3. Pengembangan naskah-naskah pada bidang penilaian seperti:
  - Pembelajaran dan Penilaian Proyek kolaborasi antar mata pelajaran pada rumpun IPA di SMA
  - Pembelajaran dan Penilaian Proyek kolaborasi antar mata pelajaran pada rumpun IPS di SMA
  - Pembelajaran dan Penilaian Proyek kolaborasi antar mata pelajaran pada rumpun IPA dan IPS di SMA
  - Pembelajaran dan Penilaian Proyek kolaborasi antar semua mata pelajaran di SMA
  - Pengembangan Instrumen Penilaian Berbasis Literasi Membaca di SMA
  - Pengembangan Instrumen Penilaian Berbasis Literasi Numerasi di SMA
  - Pengembangan Instrumen Penilaian Berbasis Literasi Sains di SMA
  - Pengembangan Portofolio Sebagai Penilaian Hasil Belajar di SMA
  - Pembelajaran Menyenangkan dan Bermakna pada Kondisi Khusus di SMA
  - Penilaian Pendidikan Karakter pada Kondisi Khusus di SMA
  - Pemanfaatan LMS pada Pembelajaran di SMA
  - Penguatan Literasi dan Numerasi di SMA (Naskah Turunan)
  - Pembelajaran Tatap Muka pada Kondisi Khusus di SMA
  - Konversi Nilai dan Matrikulasi Siswa Pindahan dari Luar Negeri
  - SMA Komprehensif

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian kinerja tersebut, sebagai berikut:

Pengembangan bahan advokasi dalam bentuk video grafis yang disebarakan melalui media sosial Direktorat SMA.



Bahan Advokasi Penunjang IKK. Persentase siswa SMA dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target tersebut, sebagai berikut:

- Proses pendampingan asesmen nasional mengalami kendala akibat pandemi Covid-19 yang menyebabkan banyak peserta yang tidak bisa hadir pendampingan.
- Belum meratanya pemahaman sekolah dan pemerintah daerah terkait fungsi dari asesmen nasional. Pandangan bahwa asesmen nasional sebagai bahan perbaikan kualitas pembelajaran belum dipahami dengan baik oleh sekolah maupun pemerintah daerah sehingga intervensi yang dilakukan untuk pelaksanaan AN kurang tepat.
- Belum ada kegiatan khusus tentang kurikulum paradigma baru/merdeka yang dilakukan oleh Direktorat SMA dikarenakan fungsi Direktorat sebagai pelaksana kebijakan, sementara kebijakan kurikulum tersebut belum ditetapkan.
- Terkait dengan naskah yang dikembangkan, belum diketahui sejauh mana efektivitas penggunaannya. Karena keterbatasan anggaran naskah belum dapat dicetak dan disampaikan ke satuan pendidikan yang berada di daerah 3T.

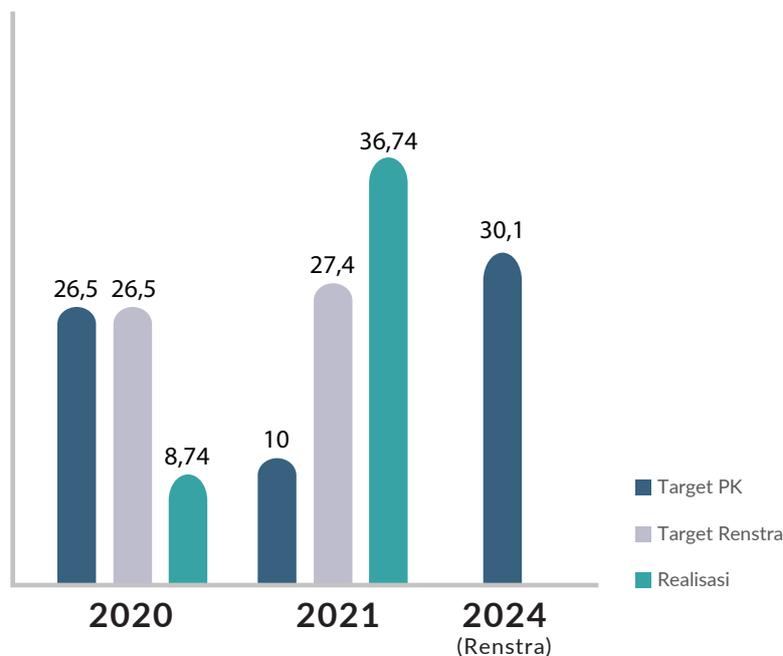
Langkah antisipasi yang diambil untuk mengatasi permasalahan atau hambatan yang dihadapi agar target indikator kinerja dapat tercapai, diantaranya adalah:

- Optimalisasi pendampingan asesmen nasional dengan memanfaatkan pertemuan daring sehingga informasi yang ingin disampaikan dapat menjangkau peserta yang lebih banyak dan memudahkan bagi peserta yang belum bisa hadir pada pertemuan tatap muka.
- Direktorat SMA melakukan koordinasi dengan unit lain terkait kurikulum, pembelajaran, dan asesmen serta memfasilitasi diskusi dengan tema tersebut baik melalui daring maupun tatap muka dengan sekolah dan pemerintah daerah.
- Pada tahun 2022, Direktorat SMA akan mengembangkan kajian untuk melihat efektifitas dari naskah yang telah dikembangkan pada tahun 2021.
- Terkait dengan belum optimalnya pemahaman sekolah terkait fungsi asesmen nasional, Direktorat SMA akan menggunakan jaringan komunikasi untuk dapat menyebarkan informasi yang dibutuhkan khususnya terkait dengan konsep dan manfaat asesmen nasional.

## IKK. Persentase siswa SMA dengan Nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) Memenuhi Kompetensi Minimum

Asesmen Kompetensi Minimum adalah asesmen yang dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengetahui kompetensi minimal siswa dalam bidang literasi, numerasi, dan karakter. Saat ini untuk numerasi terdapat empat kategori utama yang digunakan dalam mengelompokkan hasil asesmen kompetensi minimum siswa yakni perlu intervensi, dasar, cakap, dan mahir. Yang dimaksud dengan kompetensi minimum ada pada kategori cakap dan mahir. Sedangkan yang dibawah kompetensi minimum adalah perlu intervensi dan dasar.

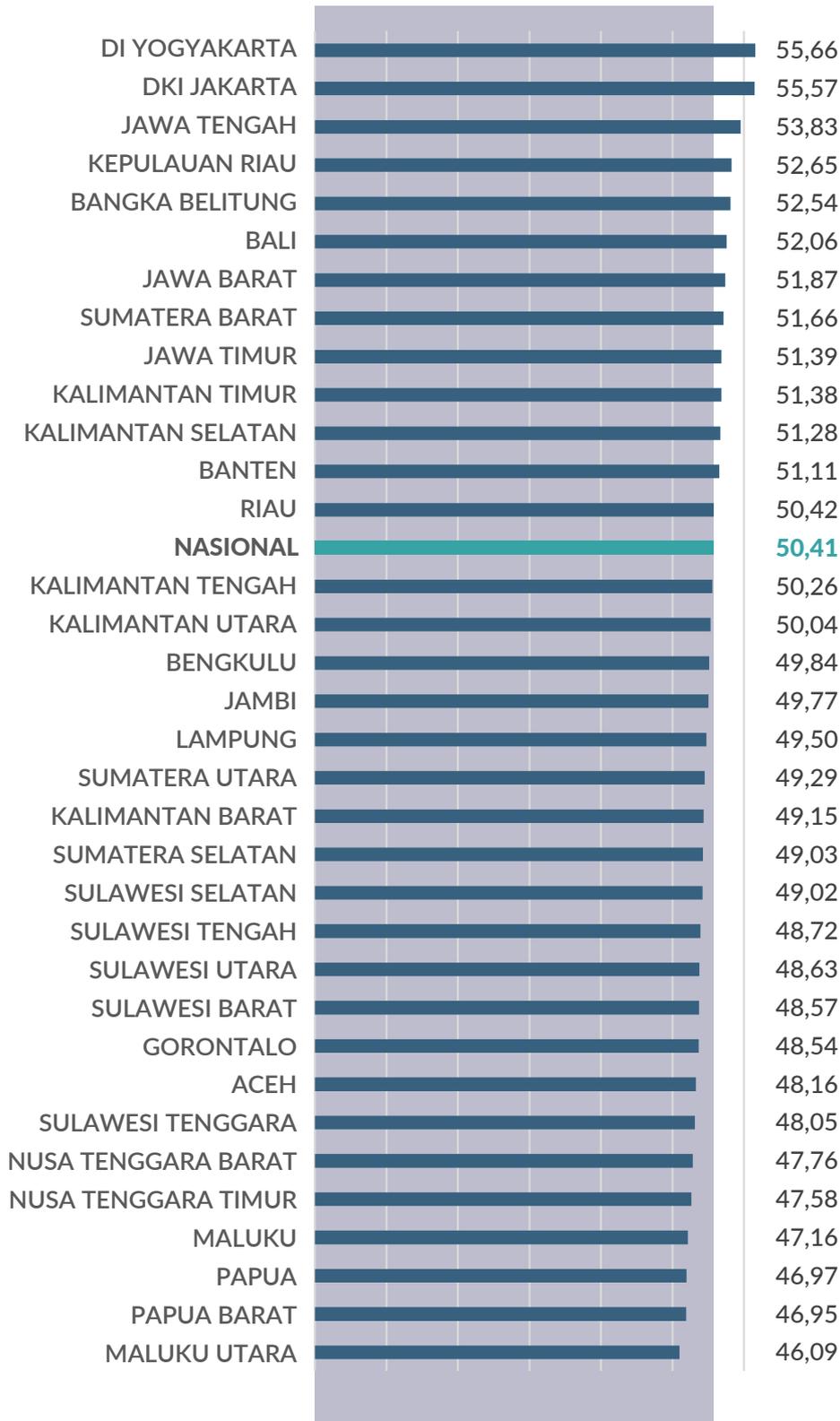
Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Standar Kompetensi dan Asesmen Pendidikan, terdapat 36,74% yang termasuk dalam kategori memenuhi kompetensi minimum. Capaian tersebut melebihi target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja yakni 10%. Kesesuaian target dengan realisasi sebesar 367,4%



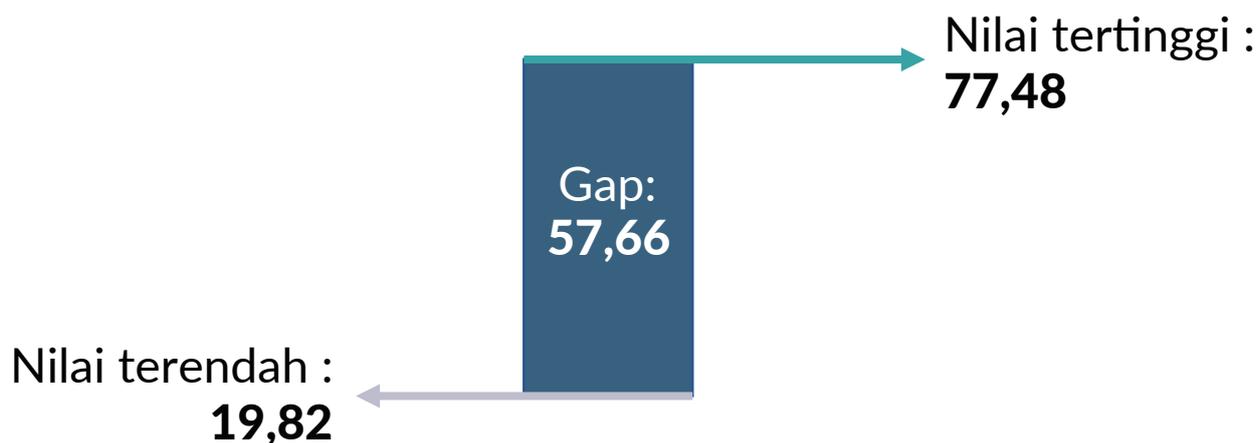
Capaian pada Perjanjian Kinerja tahun 2021 berbeda dengan capaian yang ditetapkan pada renstra. Hal tersebut diakibatkan ketidaktercapaian IKK pada tahun 2020 dimana target ditetapkan yakni 26,5 namun capaian yang diperoleh hanya 8,74. Namun, yang perlu diperhatikan adalah sumber data yang digunakan antara tahun 2020 dengan 2021 berbeda. Pada Tahun 2020, sumber data yang digunakan adalah hasil ujian nasional, sedangkan pada tahun 2021 menggunakan hasil AKM. Selain itu kondisi pandemic berpotensi untuk menurunkan efektifitas dari pembelajaran sehingga target pada tahun 2021 diproyeksikan sulit tercapai. Hal itu mengakibatkan, terjadinya penyesuaian target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dari 27,4 menjadi 10.

Capaian pada tahun 2021 yakni 36,74 telah melebihi target yang ditetapkan pada akhir renstra yakni 30,1 atau sebesar 122,05%. Hal ini menyebabkan perlunya penyesuaian terhadap renstra Direktorat SMA.

## Rata - Rata Nilai Numerasi



Berdasarkan data yang diperoleh, rata-rata nasional untuk literasi adalah 50,42. Walaupun secara target kinerja tercapai namun masih banyak provinsi yang perlu mendapatkan perhatian baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hal tersebut terlihat dari disparitas yang cukup tinggi.



Terdapat gap yang cukup signifikan yakni 57,66 dari nilai tertinggi dan nilai terendah yang diperoleh peserta didik. Kondisi ini menunjukkan adanya disparitas yang cukup tinggi terkait kompetensi numerasi di Indonesia. Kondisi perlu mendapatkan perhatian pemerintah pusat dan daerah.

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian kinerja tersebut, sebagai berikut:

- Pendampingan dan supervisi persiapan serta pelaksanaan Asesmen Nasional
- Diskusi dan koordinasi pelaksanaan pembelajaran dan asesmen yang melibatkan perwakilan dinas Pendidikan daerah, sekolah, dan praktisi Pendidikan. Diskusi dan koordinasi dilakukan untuk melakukan identifikasi dan pencarian solusi agar proses pembelajaran dan asesmen di sekolah dapat berjalan dengan baik. Adapun tema yang dibahas yakni pembelajaran tatap muka, panduan konversi nilai, bahan strategi penguatan literasi dan numerasi dan inspirasi diversifikasi kurikulum di SMA.
- Pengembangan naskah-naskah pada bidang penilaian seperti:
  1. Pembelajaran dan Penilaian Proyek kolaborasi antar mata pelajaran pada rumpun IPA di SMA
  2. Pembelajaran dan Penilaian Proyek kolaborasi antar mata pelajaran pada rumpun IPS di SMA
  3. Pembelajaran dan Penilaian Proyek kolaborasi antar mata pelajaran pada rumpun IPA dan IPS di SMA
  4. Pembelajaran dan Penilaian Proyek kolaborasi antar semua mata pelajaran di SMA
  5. Pengembangan Instrumen Penilaian Berbasis Literasi Membaca di SMA
  6. Pengembangan Instrumen Penilaian Berbasis Literasi Numerasi di SMA
  7. Pengembangan Instrumen Penilaian Berbasis Literasi Sains di SMA
  8. Pengembangan Portofolio Sebagai Penilaian Hasil Belajar di SMA
  9. Pembelajaran Menyenangkan dan Bermakna pada Kondisi Khusus di SMA
  10. Penilaian Pendidikan Karakter pada Kondisi Khusus di SMA
  11. Pemanfaatan LMS pada Pembelajaran di SMA
  12. Penguatan Literasi dan Numerasi di SMA (Naskah Turunan)
  13. Pembelajaran Tatap Muka pada Kondisi Khusus di SMA
  14. Konversi Nilai dan Matrikulasi Siswa Pindahan dari Luar Negeri
  15. Pendidikan inklusi di SMA

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian kinerja tersebut, sebagai berikut:

Pengembangan bahan advokasi dalam bentuk video grafis yang disebarakan melalui media sosial Direktorat SMA.



Bahan Advokasi Penunjang IKK. Persentase siswa SMA dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target tersebut, sebagai berikut:

- Proses pendampingan asesmen nasional mengalami kendala akibat pandemi Covid-19 yang menyebabkan banyak peserta yang tidak bisa hadir pendampingan.
- Belum meratanya pemahaman sekolah dan pemerintah daerah terkait fungsi dari asesmen nasional. Pandangan bahwa asesmen nasional sebagai bahan perbaikan kualitas pembelajaran belum dipahami dengan baik oleh sekolah maupun pemerintah daerah sehingga intervensi yang dilakukan untuk pelaksanaan AN kurang tepat.
- Belum ada kegiatan khusus tentang kurikulum paradigma baru/merdeka yang dilakukan oleh Direktorat SMA dikarenakan fungsi Direktorat sebagai pelaksana kebijakan, sementara kebijakan kurikulum tersebut belum ditetapkan.
- Terkait dengan naskah yang dikembangkan, belum diketahui sejauh mana efektivitas penggunaannya. Karena keterbatasan anggaran naskah belum dapat dicetak dan disampaikan ke satuan pendidikan yang berada di daerah 3T.

Langkah antisipasi yang diambil untuk mengatasi permasalahan atau hambatan yang dihadapi agar target indikator kinerja dapat tercapai, diantaranya adalah:

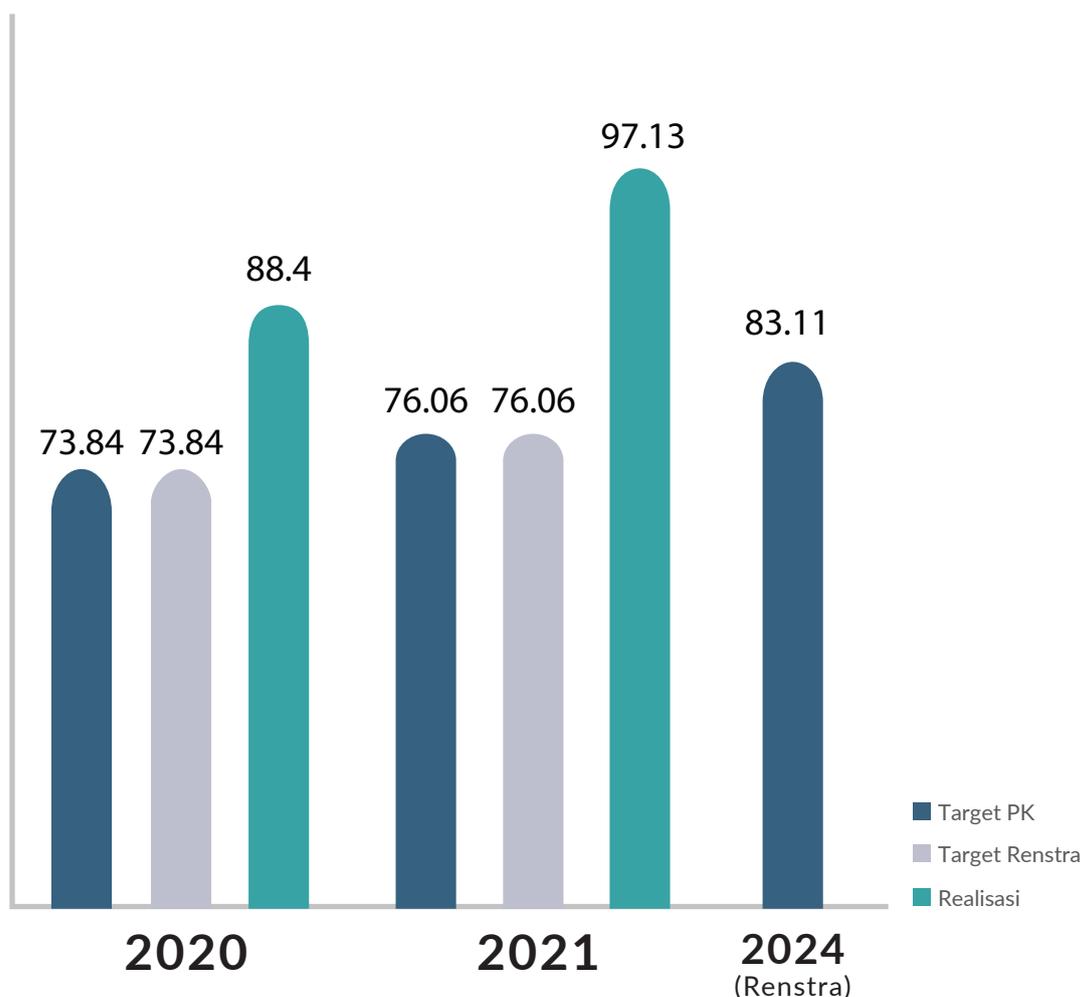
- Optimalisasi pendampingan asesmen nasional dengan memanfaatkan pertemuan daring sehingga informasi yang ingin disampaikan dapat menjangkau peserta yang lebih banyak dan memudahkan bagi peserta yang belum bisa hadir pada pertemuan tatap muka.
- Direktorat SMA melakukan koordinasi dengan unit lain terkait kurikulum, pembelajaran, dan asesmen serta memfasilitasi diskusi dengan tema tersebut baik melalui daring maupun tatap muka dengan sekolah dan pemerintah daerah.
- Pada tahun 2022, Direktorat SMA akan mengembangkan kajian untuk melihat efektifitas dari naskah yang telah dikembangkan pada tahun 2021.
- Terkait dengan belum optimalnya pemahaman sekolah terkait fungsi asesmen nasional, Direktorat SMA akan menggunakan jaringan komunikasi untuk dapat menyebarkan informasi yang dibutuhkan khususnya terkait dengan konsep dan manfaat asesmen nasional.

## IKK. Persentase SMA yang Menggunakan Peralatan TIK (komputer) dalam Proses Pembelajaran

Capaian IKK ditunjukkan melalui perbandingan jumlah satuan pendidikan SMA yang memiliki peralatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan digunakan dalam pembelajaran. TIK yang dimaksud tidak hanya komputer namun semua alat yang menunjang proses belajar mengajar termasuk kelengkapannya. Data penggunaan TIK dalam kegiatan belajar mengajar didapat dari sejumlah data pengisian pada Dapodik.

Metode perhitungan yang digunakan adalah jumlah satuan pendidikan yang memiliki TIK dan digunakan dalam pembelajaran dibagi jumlah satuan pendidikan pada jenjang SMA. Sumber data yang digunakan adalah data yang terdapat di dalam Dapodik

Berdasarkan data yang terdapat di dalam Dapodik, terdapat 97,1% SMA yang menggunakan peralatan TIK (komputer) dalam proses pembelajaran. Capaian tersebut melebihi target yang telah ditetapkan yakni 76,06%. Kesesuaian target dengan realisasi sebesar 127,70%.



Terdapat kenaikan yang signifikan dari capaian tahun 2020. Pada tahun 2020 capaian pada IKK yakni 88,4 sedangkan pada tahun 2021 terjadi kenaikan sebanyak 8,73% menjadi 97,13. Capaian pada tahun 2021 berada di atas capaian akhir renstra atau sebesar 116,86% sehingga perlu dilakukan revaluasi kembali terhadap capaian akhir pada renstra.

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian kinerja tersebut, sebagai berikut:

1. Fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, pemantauan dan evaluasi kepada Pemerintah daerah terkait program Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik. Direktorat SMA melakukan pendampingan kepada Pemerintah daerah mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi ketercapaian program DAK Fisik. Pada proses perencanaan, Direktorat SMA melakukan pendampingan dalam bentuk penilaian usulan penerima DAK Fisik yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa persyaratan utama dan data yang terdapat di Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Hasil penilaian kemudian disampaikan kepada Pemerintah daerah untuk kemudian ditindaklanjuti hingga tahapan penetapan final penerima DAK Fisik
2. Fasilitasi dan Bimbingan Teknis Pemerintah daerah terkait program DAK Non Fisik. Direktorat SMA melakukan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program DAK Non Fisik. Salah satu hal yang ditekankan dalam pendampingan tersebut adalah penggunaan DAK Non Fisik untuk menunjang pelaksanaan kebijakan merdeka belajar. Sekolah diberikan kesempatan untuk mempergunakan dana DAK Non Fisik sesuai dengan kebutuhan namun tetap mematuhi petunjuk teknis yang berlaku. Salah satu penggunaan DAK Non Fisik yang dilakukan oleh sekolah adalah pembelian peralatan multimedia pembelajaran.
3. Pemberian bantuan alat TIK sebanyak 1.195 paket kepada sekolah. Penerima bantuan dilakukan berdasarkan hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan antara Direktorat SMA bekerjasama dengan Pusdatin. Selain untuk pemberian bantuan, verifikasi dan validasi tersebut dilakukan dalam rangka pelaksanaan asesmen nasional

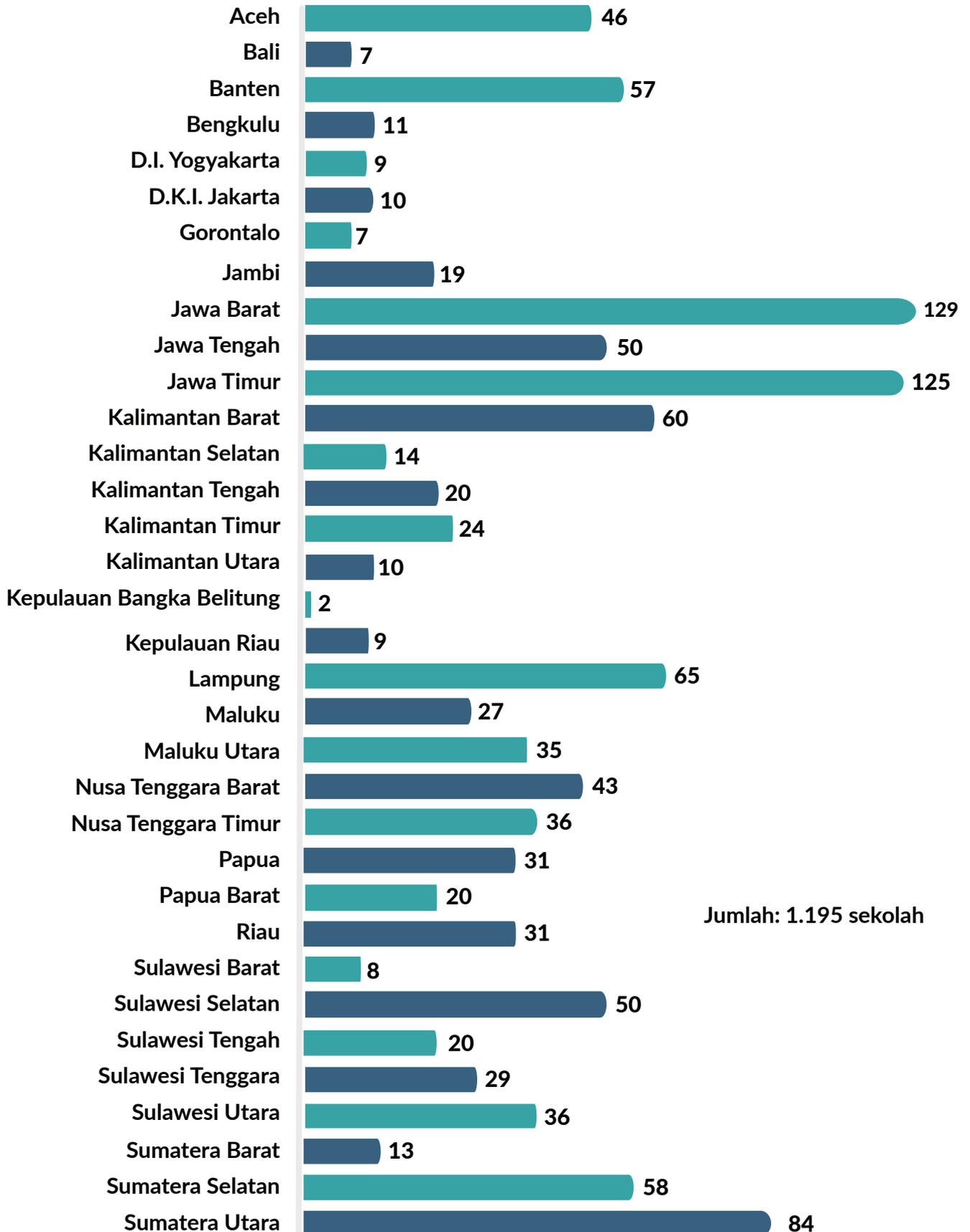
Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target tersebut, sebagai berikut:

- Pemberian bantuan pemerintah alat TIK kepada sekolah pada awalnya mengalami kendala karena tidak tersedianya barang di katalog online.

Langkah antisipasi yang diambil untuk mengatasi permasalahan atau hambatan yang dihadapi agar target indikator kinerja dapat tercapai, diantaranya adalah

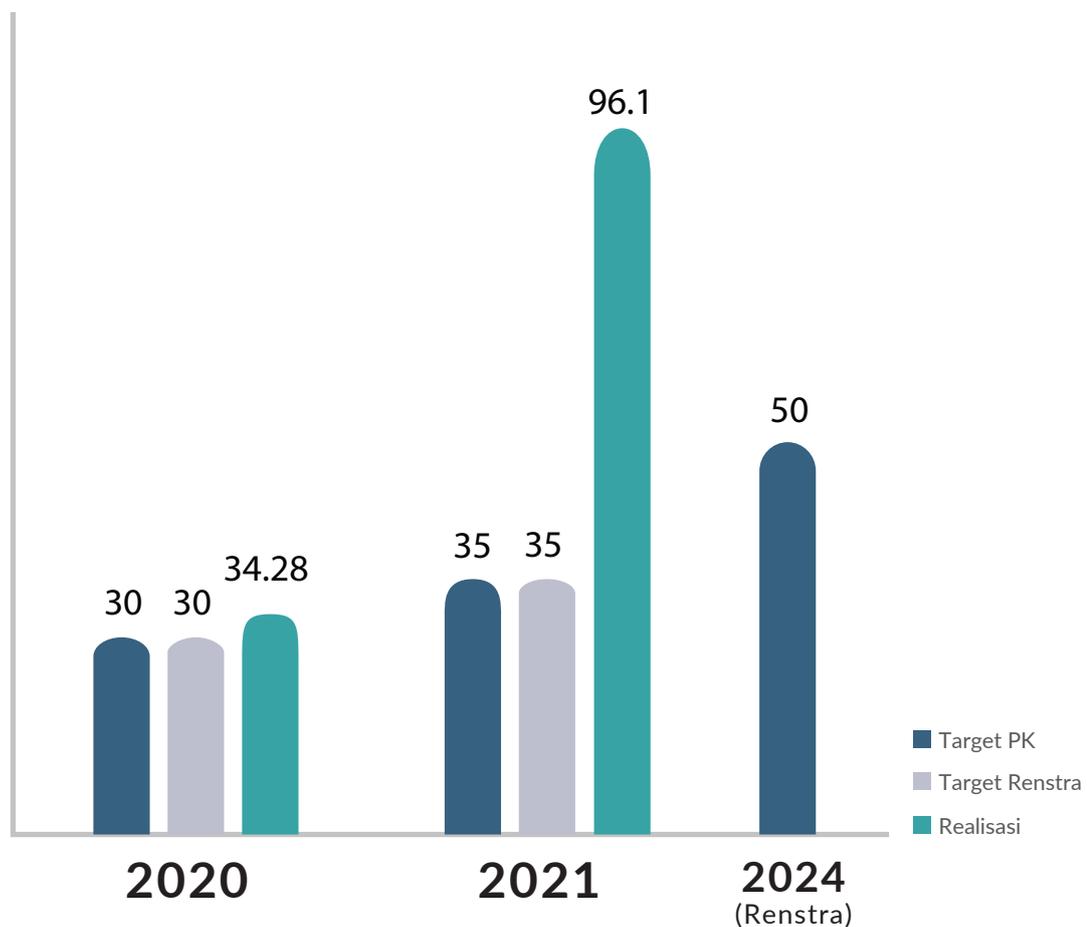
- Direktorat SMA bekerjasama dengan instansi terkait untuk penyediaan barang yang akan diberikan kepada sekolah. Selain itu, untuk memitigasi resiko, Direktorat SMA juga bekerjasama dengan kejaksaan dalam proses pengadaan alat TIK bagi sekolah.

## Bantuan Pemerintah Alat TIK



## IKK. Persentase SMA yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter

Lingkungan kondusif adalah lingkungan yang aman, nyaman, sehat, gembira, menarik, dan mampu membangkitkan gairah belajar. Metode perhitungan yang digunakan adalah jumlah satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif berdasarkan hasil survey dibandingkan dengan jumlah satuan pendidikan pada jenjang SMA. Survei yang dimaksud adalah Survei Lingkungan Belajar yang berisi informasi tentang kualitas pengajaran dan iklim sekolah. Variabelnya antara lain metode pengajaran, pemenuhan kebutuhan psikologis dasar siswa dan guru, interaksi antar siswa dan siswa dengan guru (tidak adanya perundungan). Sumber data yang digunakan adalah laporan hasil survey karakter oleh Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan.



Terdapat kenaikan yang signifikan dari capaian tahun 2020. Pada tahun 2020 capaian pada ikk yakni 34,28 sedangkan pada tahun 2021 terjadi kenaikan sebanyak 61,73% menjadi 96,01. Namun, yang perlu mendapatkan perhatian adalah sumber data yang digunakan berbeda antara 2020 dengan 2021. Pada tahun 2020, sumber data yang digunakan adalah hasil rapor mutu. Sedangkan tahun 2021, sumber data yang digunakan adalah survei lingkungan belajar. Perbedaan sumber data yang digunakan, disebabkan pada tahun 2020, belum dilaksanakan survei lingkungan belajar. Kesesuaian realisasi dengan target tahun 2021 sebesar 274,31%. Capaian pada tahun 2021 berada di atas capaian akhir renstra atau sebesar 192,02% sehingga perlu dilakukan revaluasi kembali terhadap capaian akhir pada renstra.

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian kinerja tersebut, sebagai berikut:

1. Pemberian bantuan penanganan perundungan pada satuan pendidikan kepada 381 sekolah penggerak. Bantuan penanganan perundungan diberikan bagi sekolah untuk melaksanakan program Roots. Adapun program Roots ini merupakan program inovasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk menangani salah satu dari tiga dosa besar pendidikan yakni perundungan.
2. Fasilitasi kepada pemerintah daerah dan sekolah dalam bentuk Bimbingan teknis revolusi UKS
3. Fasilitasi kepada pemerintah daerah dan sekolah dalam bentuk Bimbingan teknis generasi remaja sekolah ramah anak
4. Fasilitasi kepada pemerintah daerah dan sekolah dalam bentuk Bimbingan teknis aksi kebangsaan dengan tema kerohanian dan bela negara
5. Fasilitasi kepada pemerintah daerah dan sekolah dalam bentuk pelaksanaan Kawah Kepemimpinan Pelajar
6. Fasilitasi kepada pemerintah daerah dan sekolah dalam bentuk Pelaksanaan Bimbingan teknis Keterampilan kewirausahaan
7. Pemberian bantuan sanitasi 750 paket kepada sekolah dalam rangka persiapan pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas dan persiapan perilaku hidup bersih sehat.
8. Pemberian bantuan pemerintah terkait kewirausahaan kepada 46 lembaga dan/atau sekolah. Bantuan tersebut diberikan agar sekolah dapat mengembangkan karakter kewirausahaan yang hendaknya dimiliki oleh peserta didik. Melalui karakter kewirausahaan yang dimilikinya, peserta didik dapat menghadapi masa depannya.

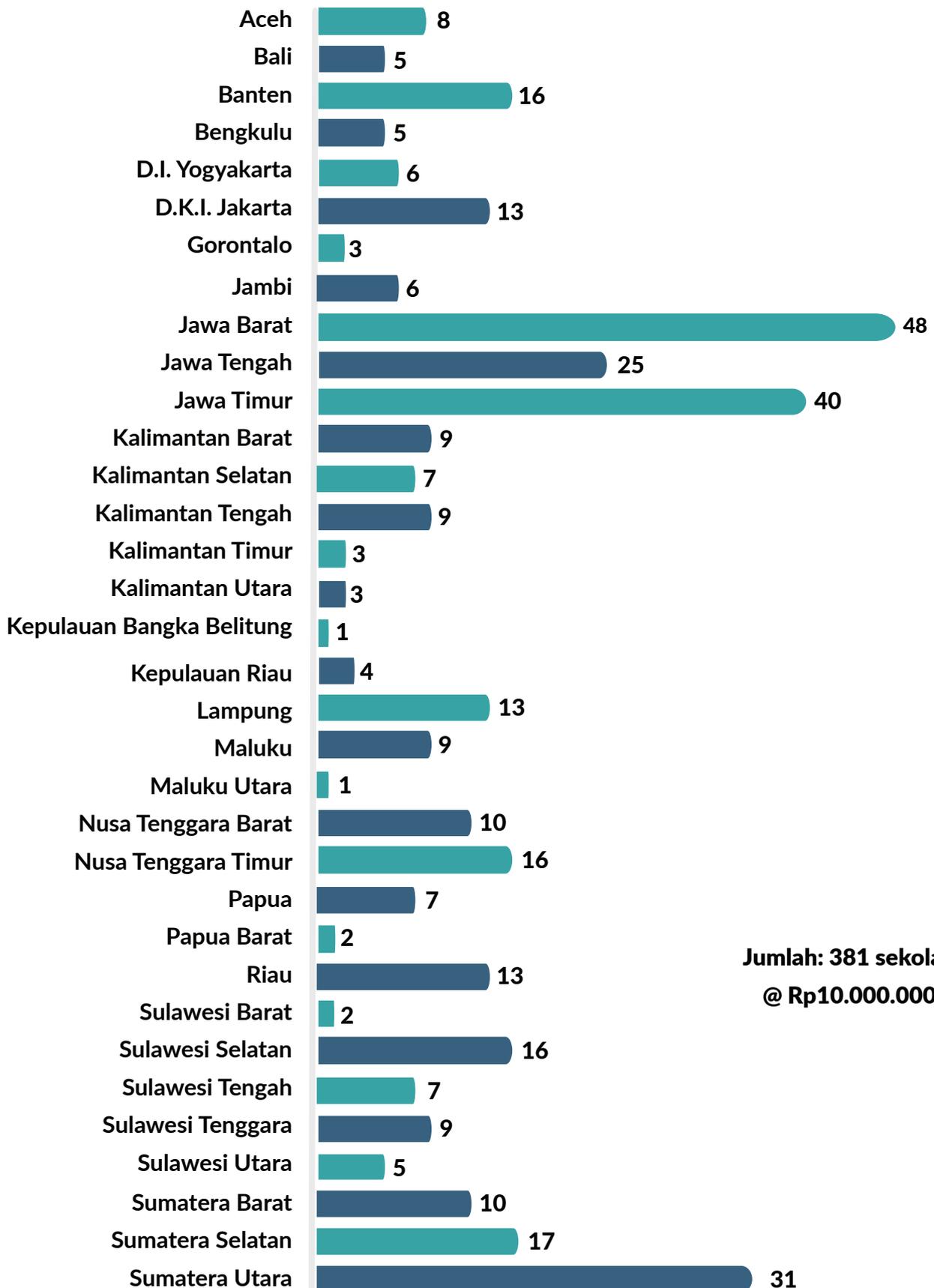
Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target tersebut, sebagai berikut:

- Pelaksanaan kegiatan pembinaan yang seharusnya bagi peserta didik, tidak dapat dilakukan mengingat kondisi pandemi Covid-19.
- Terdapat potensi sasaran dari kegiatan yakni peserta didik tidak menerima manfaat dari pelaksanaan bimbingan teknis.

Langkah antisipasi yang diambil untuk mengatasi permasalahan atau hambatan yang dihadapi agar target indikator kinerja dapat tercapai, adalah

- mengoptimalkan penggunaan pertemuan daring bagi peserta yang belum dapat menghadiri bimbingan teknis.
- Membuat rencana tindak lanjut bagi peserta kegiatan untuk mengimplementasikan materi bimbingan teknis yang telah diterima.
- Pelaksanaan pembinaan bagi peserta didik dilakukan dengan mengundang wakasek bagian kesiswaan, dengan harapan informasi dan materi yang disampaikan dapat diimplementasikan oleh sekolah dan berdampak bagi peserta didik.

## Bantuan Pemerintah Anti Perundungan

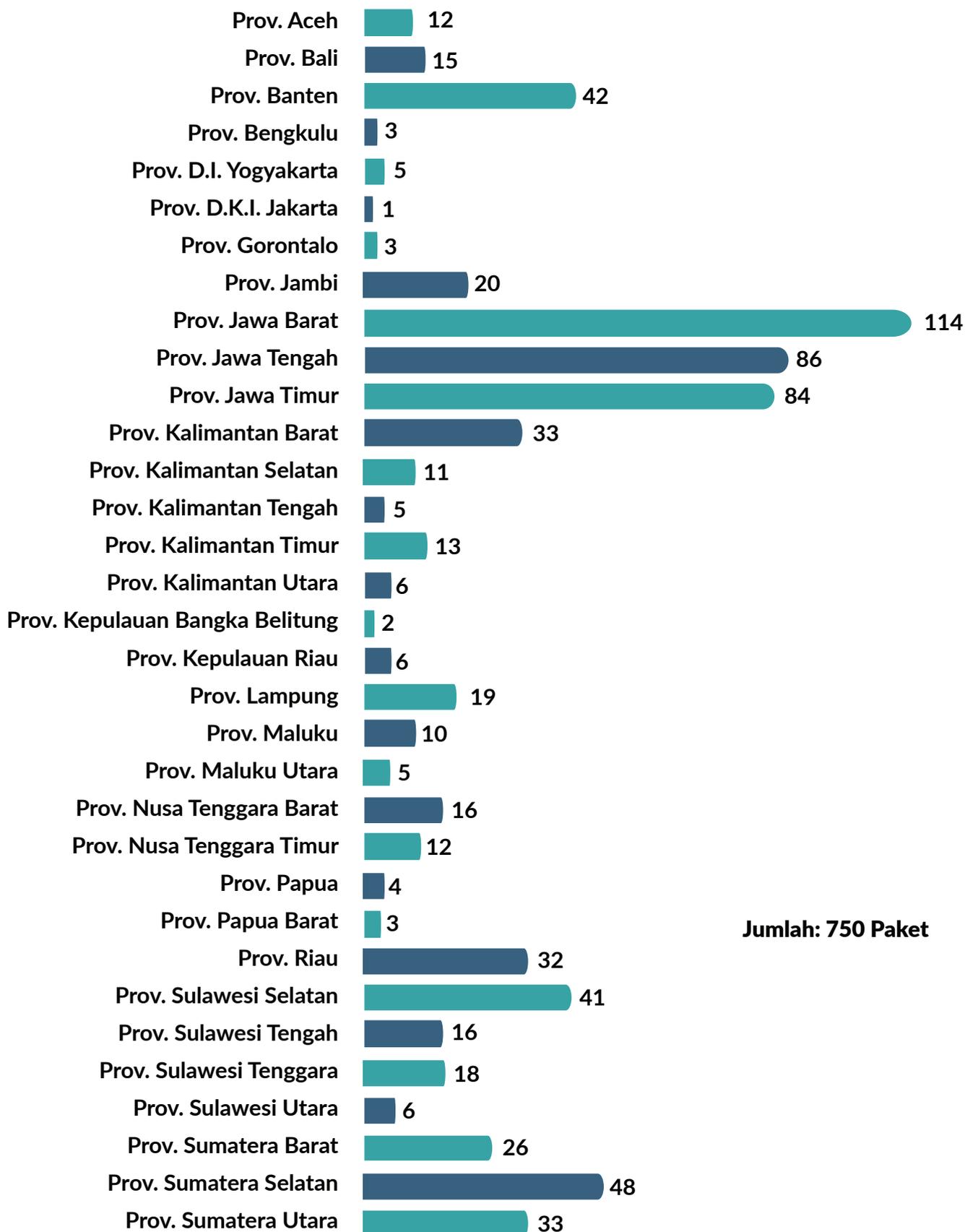


## Bantuan Pemerintah Kewirausahaan

No.	Provinsi	Yayasan/ lembaga	SMA	Total
1	Aceh	-	1	1
2	Bali	1	1	2
3	Banten	2	1	3
4	Bengkulu	-	1	1
5	D.I. Yogyakarta	1	1	2
6	D.K.I. Jakarta	7	1	8
7	Gorontalo	-	1	1
8	Jambi	-	1	1
9	Jawa Barat	-	1	1
10	Jawa Tengah	-	1	1
11	Jawa Timur	-	1	1
12	Kalimantan Barat	-	1	1
13	Kalimantan Selatan	-	1	1
14	Kalimantan Tengah	-	1	1
15	Kalimantan Timur	-	1	1
16	Kalimantan Utara	-	1	1
17	Kepulauan Bangka Belitung	-	1	1
18	Kepulauan Riau	-	1	1
19	Lampung	-	1	1
20	Maluku	-	1	1
21	Maluku Utara	-	1	1
22	Nusa Tenggara Barat	-	1	1
23	Nusa Tenggara Timur	-	1	1
24	Papua	-	1	1
25	Papua Barat	-	1	1
26	Riau	-	1	1
27	Sulawesi Barat	-	1	1
28	Sulawesi Selatan	1	1	2
29	Sulawesi Tengah	-	1	1
30	Sulawesi Tenggara	-	1	1
31	Sulawesi Utara	-	1	1
32	Sumatera Barat	-	1	1
33	Sumatera Selatan	-	1	1
34	Sumatera Utara	-	1	1
Jumlah		12	34	46

**Jumlah: 46 lembaga/sekolah**  
**@ Rp50.000.000 - Rp100.000.000**

## Bantuan Pemerintah Sanitasi

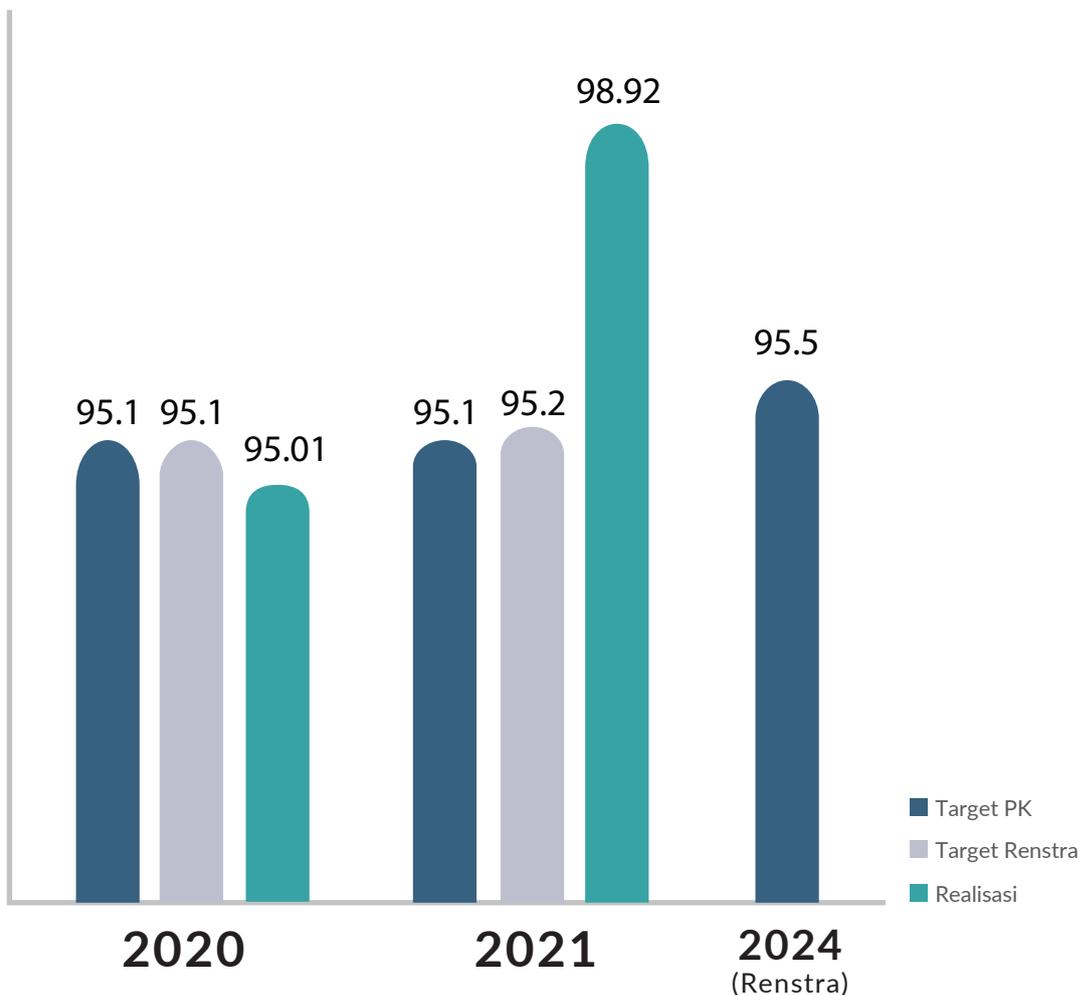


## IKK. Persentase Data Pokok Pendidikan SMA yang Akurat, Terbaru, dan Berkelanjutan

**D**ata Pokok Pendidikan adalah sistem pendataan yang dikelola Kemendikbud dan memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, serta substansi pendidikan yang bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara daring melalui laman Dapodik.

Data Pokok Pendidikan dinyatakan akurat apabila data telah melalui tahap cleansing data (ganda, salah satuan, dsb), persentase di atas rata-rata 95%. Data Pokok Pendidikan dinyatakan berkelanjutan apabila pendataan dilakukan berkelanjutan dalam jangka waktu yang terus-menerus dengan persentase di atas rata-rata 95%. Data Pokok Pendidikan dinyatakan terbaru apabila pemutakhiran data dilakukan berkelanjutan dalam jangka waktu yang terus-menerus dengan persentase di atas rata-rata 95%.

Capaian Direktorat SMA terkait persentase data pokok pendidikan SMA yang akurat, terbaru dan berkelanjutan adalah 98,92% SMA. Capaian tersebut lebih tinggi dari target yakni 95,1%. Kesesuaian target dengan realisasi sebesar 104,2%.



Terdapat kenaikan dari capaian tahun 2020. Pada tahun 2020 capaian pada ikk yakni 95,01 sedangkan pada tahun 2021 terjadi kenaikan sebanyak 3,91 menjadi 98,92. Capaian pada tahun 2021 berada di atas capaian akhir renstra atau sebesar 103,58% sehingga perlu dilakukan revaluasi kembali terhadap capaian akhir pada renstra.

Indikator Kualitas Data	Capaian
Akurasi	98,28
Muktahir	99,78
Berkelanjutan	98,71

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian kinerja tersebut, sebagai berikut:

1. Pengembangan bahan advokasi dalam bentuk naskah dengan judul analisis data SMA Tahun 2020 dan buku saku peningkatan kualitas data SMA.
2. Penyediaan tim data khusus untuk jenjang SMA dalam penanganan permasalahan terkait Dapodik di satuan pendidikan.
3. Pemanfaatan Dapodik dalam program DAK Fisik dan Non Fisik, meningkatkan *awareness* dari sekolah dan pemerintah daerah akan pentingnya data di dalam Dapodik.
4. Koordinasi yang intensif antara pemerintah pusat dan daerah terkait kondisi data di dalam Dapodik khususnya dalam beberapa program seperti pelaksanaan Asesmen Nasional, cut off dapodik, dll.

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target tersebut, sebagai berikut:

- Walaupun nilai terbarukan pada jenjang SMA sudah tinggi, namun tingkat kesadaran satuan pendidikan untuk terus melakukan updating secara berkala masih perlu ditingkatkan mengingat terdapat beberapa data yang sifatnya dinamis.
- Kesadaran satuan pendidikan untuk tidak menyerahkan seluruh proses pendataan kepada operator masih rendah. Pembagian tanggung jawab seharusnya menjadi tanggung jawab bersama bagi warga satuan pendidikan.

Langkah antisipasi yang diambil untuk mengatasi permasalahan atau hambatan yang dihadapi agar target indikator kinerja dapat tercapai, adalah

- Direktorat SMA melakukan advokasi kepada pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan rasa memiliki data di sekolah dan tidak menyerahkan sepenuhnya kepada operator dapodik.
- Meningkatkan pemanfaatan data dapodik dalam berbagai program dan intervensi yang akan dilakukan oleh Direktorat SMA. Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas dari data di dalam Dapodik.

## SK 2 – Menguatnya Tata Kelola dan Sistem Pengendalian Manajemen Di Lingkungan Ditjen PAUD Dikdas Dikmen

Rata-rata predikat SAKIP  
Satker minimal BB

Target :

Realisasi :

**A A**

Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas  
Pelaksanaan RKAKL masing-masing  
Satker minimal 80

Target :

Realisasi :

**82 88,34**

Pada Sasaran Kegiatan menguatnya tata kelola dan sistem pengendalian manajemen di lingkungan Ditjen PAUD, Dikdas, Dikmen terdapat 2 indikator yakni SAKIP dan Nilai Kinerja Anggaran. Terkait dengan SAKIP, realisasi yang dicapai sesuai dengan target. Namun apabila diperhatikan terjadi peningkatan nilai SAKIP dari tahun 2020 yakni 80,93 menjadi 84,74 di tahun 2021.

Terkait dengan nilai kinerja anggaran, walaupun realisasi melebihi target namun terjadi penurunan capaian dari tahun 2020. Penurunan capaian terjadi karena perubahan mekanisme penghitungan efisiensi yang menyebabkan nilai efisiensi pada EKA menjadi kecil. Selain itu, konsistensi halaman 3 DIPA dan realisasi pada komponen IKPA memperoleh nilai yang kurang maksimal. Hal tersebut mempengaruhi capaian Nilai Kinerja Anggaran di tahun 2021.

## IKK. Rata-rata Predikat SAKIP Satker minimal BB

Tahun	Target	Realisasi
2020	BB	A (80,93)
2021	A	A (84,79)
Renstra	A	

Capaian SAKIP Tahun 2021	
Komponen	Bobot Nilai
1. Pencanaan Kinerja	28,64
2. Pengukuran Kinerja	17,81
3. Pelaporan Kinerja	13,66
4. Evaluasi Internal	7,84
5. Capaian Kinerja	16,75
Total Nilai	84,79

Berdasarkan Perpres 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP): SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB No. 12 Tahun 2015, penilaian SAKIP didasarkan pada 5 komponen penilaian yaitu:

Komponen	Bobot Nilai
1. Pencanaan Kinerja	30%
2. Pengukuran Kinerja	25%
3. Pelaporan Kinerja	15%
4. Evaluasi Internal	10%
5. Capaian Kinerja	20%
Total Nilai	100%

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian kinerja tersebut, sebagai berikut:

1. Penyusunan laporan bulanan yang terdiri dari evaluasi kinerja dan anggaran di lingkungan Direktorat SMA
2. Penyusunan laporan triwulan dan semester yang terdiri dari evaluasi kinerja, anggaran, dan capaian IKK di lingkungan Direktorat SMA.
3. Penyusunan program kerja dan rencana aksi untuk tahun 2021 di lingkungan Direktorat SMA
4. Penyusunan sasaran kinerja pegawai di lingkungan Direktorat SMA
5. Reviu standar operasional di lingkungan Direktorat SMA.
6. Upaya mencapai predikat ZI WBK di lingkungan Direktorat SMA.

Terdapat beberapa hal yang menjadi rekomendasi bagi peningkatan nilai SAKIP di tahun 2022, diantaranya:

- Target jangka menengah di dalam Renstra agar dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan (Laporan Kinerja BAB III agar menyajikan perbandingan dan analisis capaian kinerja tahun berjalan dengan target akhir Renstra)
- Hasil pengukuran kinerja agar dimanfaatkan sebagai dasar pemberian reward & punishment yang diberikan kepada Pejabat /Pegawai /Tim di lingkungan unit kerja/satker berupa Surat Keputusan Pimpinan Satker tentang penetapan penerima penghargaan atau sertifikat/piagam, dan foto dokumentasi penyerahan penghargaan.
- Laporan Kinerja agar menyajikan informasi terkait pencapaian sasaran (outcome) untuk setiap sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja
- Laporan Kinerja agar menyajikan perbandingan capaian kinerja tahun berjalan dengan capaian kinerja minimal satu tahun sebelumnya bila indikatornya sama dan menyajikan capaian kinerja tahun berjalan dengan target akhir Renstra untuk masing-masing target indikator kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja setiap Pimpinan Satker
- Unit kerja agar menyajikan penghargaan-penghargaan dari eksternal Kemendikbudristek

Langkah antisipasi yang diambil untuk mengatasi permasalahan atau hambatan yang dihadapi agar target indikator kinerja dapat tercapai, adalah

- Direktorat SMA akan melaksanakan rekomendasi yang disampaikan pada lembar hasil evaluasi penilaian SAKIP Tahun 2021.
- Pada tahun 2021, Direktorat SMA telah mendapatkan predikat ZI WBK. Untuk tahun 2022 Direktorat SMA akan berupaya mendapatkan predikat ZI WBBM.



## IKK. Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKAKL masing-masing Satker minimal 80

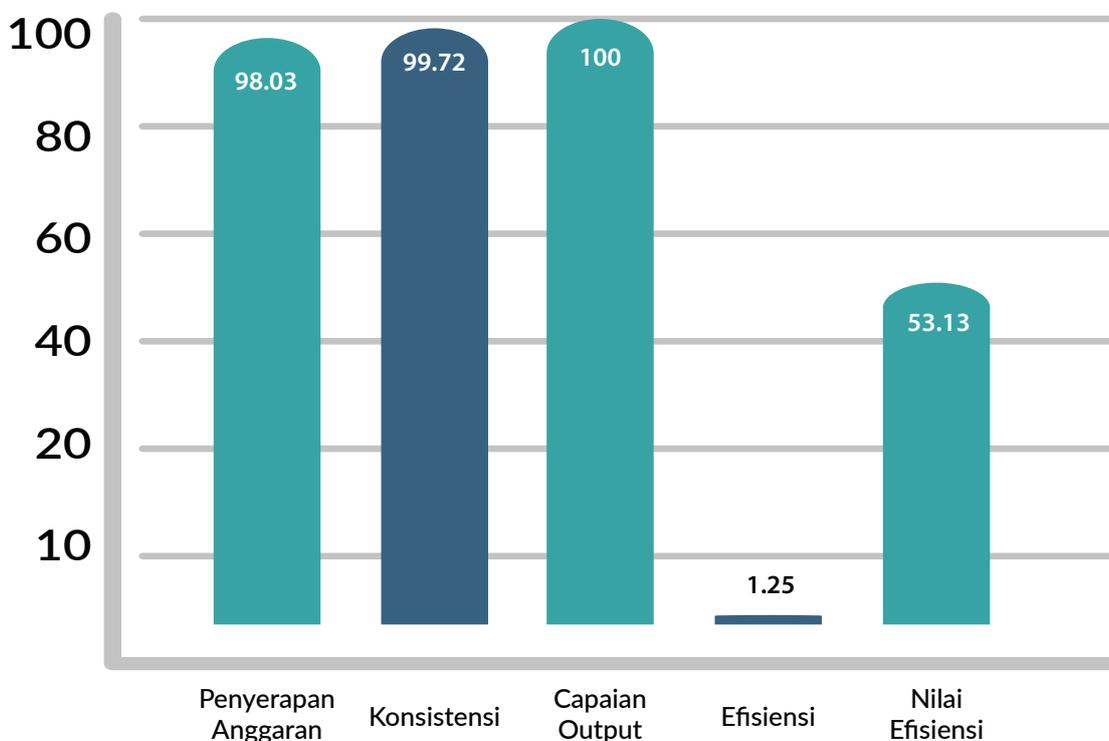
Kinerja Anggaran dalam PMK No. 214 / PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L dievaluasi dalam rangka pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran. Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran dilakukan atas 3 aspek yaitu aspek konteks, aspek implementasi dan aspek manfaat.

Penilaian Kinerja dilakukan atas 2 indikator

1. Indikator Kinerja atas Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2. Indikator Kinerja atas hasil pelaksanaan anggaran (EKA)

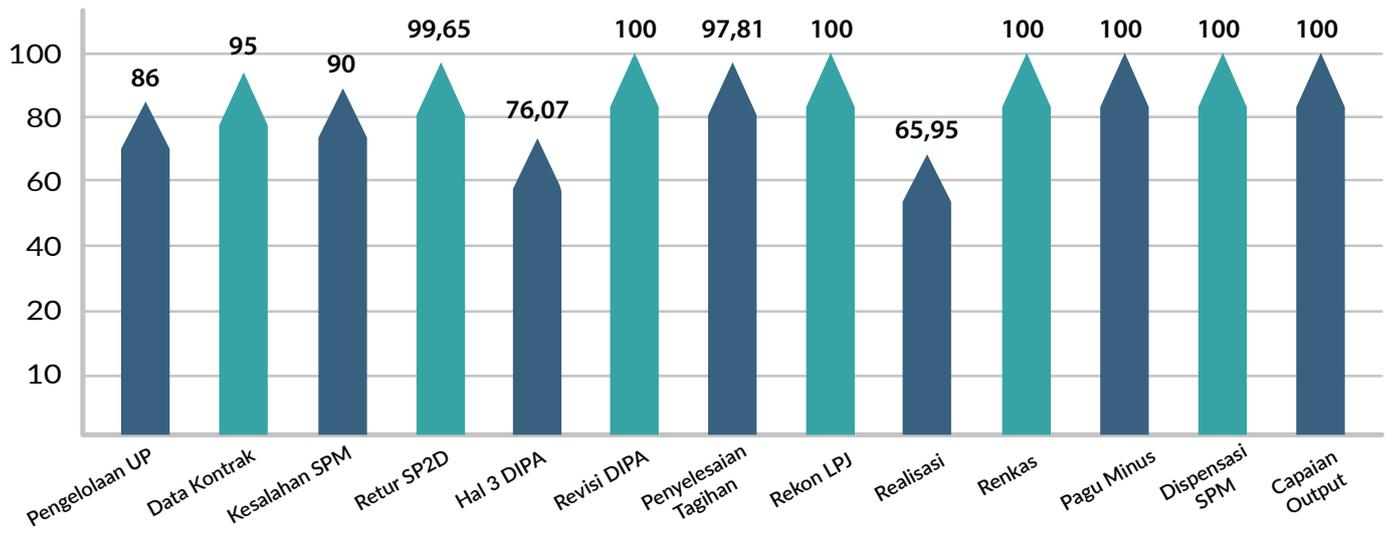
IKPA Berkontribusi 40% dalam perhitungan nilai Kinerja dan EKA 60%

Bobot masing-masing variabel pada Aspek Implementasi sebagaimana dimaksud terdiri atas: capaian keluaran, efisiensi, konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan, dan penyerapan anggaran. Sumber data nilai kinerja anggaran diperoleh melalui SMART DJA.

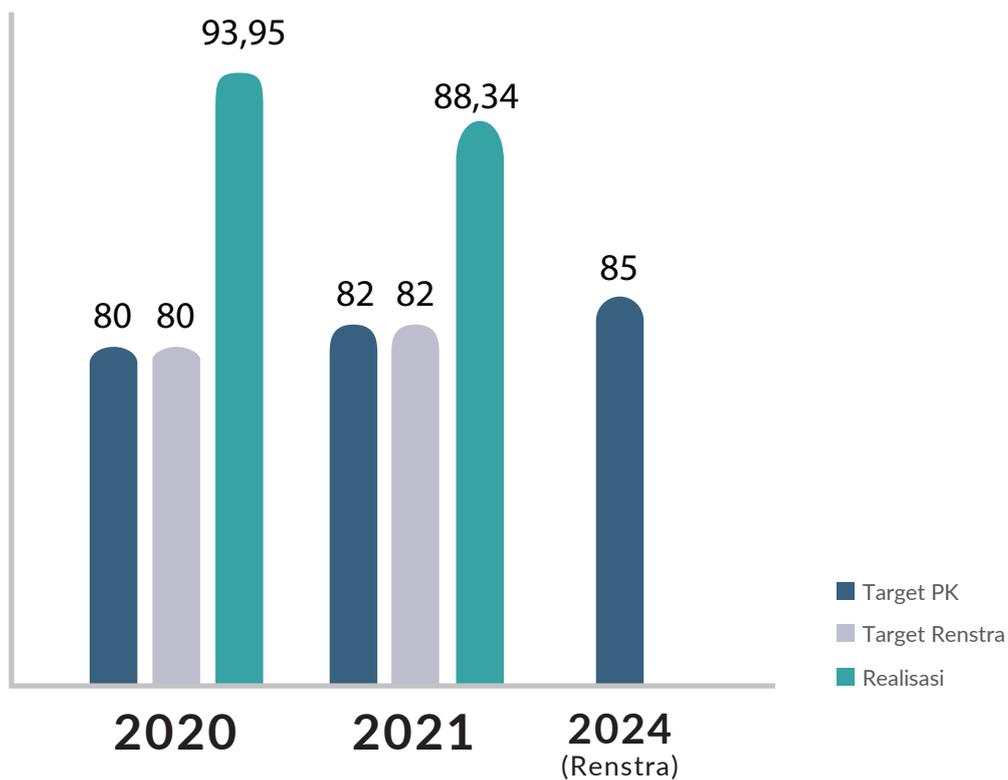


Keterangan :

Bobot Penyerapan : **9,7%**    Bobot Konsistensi : **18,2%**    Bobot Capaian Rincian Output : **43,5%**  
 Bobot Efisiensi : **28,6%**    Nilai Efisiensi :  $((50/100) \times 100) + ((\text{Efisiensi}/20) \times 50)$



Capaian IKPA sebesar 91,33 dan capaian EKA sebesar 86,35. Berdasarkan kedua capaian tersebut maka nilai kinerja anggaran di lingkungan Direktorat SMA sebesar 88,34. Capaian tersebut lebih besar dibandingkan target yang tertera pada PK dan renstra yakni 82. Ketercapaian realisasi dengan target sebesar 107,73%.



IKK terkait Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKAKL masing-masing Satker minimal 80 terdapat pada perjanjian kinerja mulai tahun 2021. Jika melihat capaian saat ini, selain sudah melebihi target yang ditetapkan pada tahun 2021, untuk target renstra tahun 2024 pun sudah terlewati yakni 103,92%. Oleh karena itu, diperlukan peninjauan kembali terhadap capaian akhir pada renstra 2024. Untuk capaian nilai kinerja anggaran, walaupun melebihi target yang ditetapkan, pada tahun 2021 terjadi penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2020. Hal tersebut disebabkan karena nilai efisiensi yang tidak optimal. Nilai efisiensi dipengaruhi oleh capaian output dan capaian IKK. sedangkan tahun ini berdasarkan kebijakan perubahan struktur penilaian hanya pada capaian rincian output saja.

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian kinerja tersebut, sebagai berikut:

- Pelaksanaan monitoring bulanan, triwulan, dan semester yang terdiri dari monitoring kinerja dan anggaran di lingkungan Direktorat SMA. Monitoring dilakukan untuk melihat ketercapaian dari Penyusunan program kerja dan rencana aksi untuk tahun 2021 di lingkungan Direktorat SMA

Beberapa hal yang perlu ditingkatkan pada tahun berikutnya adalah

- Kemampuan bagian keuangan dalam mengelola administrasi keuangan seperti uang persediaan, data kontrak, SPM, dan Retur SP2D.
- Kesesuaian antara realisasi dengan rencana penarikan dana.

Tindak lanjut yang dapat dilakukan adalah

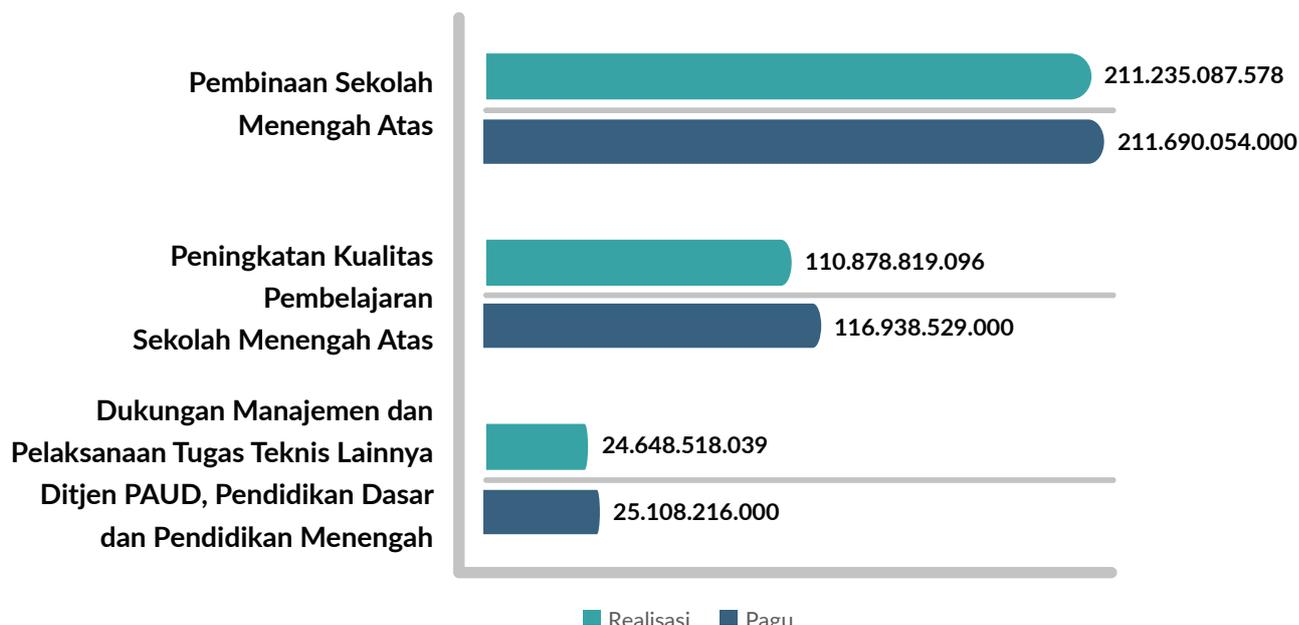
- Mengembangkan kemampuan sumber daya manusia di bagian keuangan dalam mengelola administrasi keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Melakukan pembaruan secara berkala terhadap rencana penarikan dana apabila sudah terindikasi terjadi pergeseran alokasi atau waktu penyelenggaraan pekerjaan.

# Realisasi Anggaran

Pagu anggaran untuk Direktorat SMA pada tahun 2021 sebesar Rp. 353.736.799.000. Pagu tersebut digunakan untuk membiayai 2 Sasaran Kegiatan, dan 10 Indikator Kinerja Kegiatan yang tersebar di 3 kegiatan utama yakni Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Peningkatan Kualitas Pembelajaran Sekolah Menengah Atas, dan Pembinaan Sekolah Menengah Atas.



Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Program	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran
Tersedianya layanan pendidikan Sekolah Menengah Atas yang merata dan berkualitas	<p>Jumlah kab/kota dengan APK SMA/SMLB/Sederajat sekurang-kurangnya 95%</p> <p>Jumlah SMA yang menjadi Sekolah Penggerak</p> <p>Persentase SMA yang memiliki nilai kinerja sekolah (Score Card) minimal 75 (Kategori Sangat Tinggi)</p> <p>Persentase siswa SMA dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum</p> <p>Persentase siswa SMA dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum</p> <p>Persentase SMA yang menggunakan peralatan TIK (komputer) dalam proses pembelajaran</p> <p>Persentase SMA yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter</p> <p>Persentase data pokok pendidikan SMA yang akurat, terbaru dan berkelanjutan</p>	Pembinaan Sekolah Menengah Atas & Peningkatan Kualitas Pembelajaran Sekolah Menengah Atas	328.628.583.000	322.113.906.674	98,02%
Menguatnya tata kelola dan sistem pengendalian di lingkungan Ditjen Paud, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah	<p>Rata-rata predikat SAKIP Satker Minimal B</p> <p>Rata-rata nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKAKL masing-masing satker minimal 80</p>	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah	25.108.216.000	24.648.518.039	98,17%



Realisasi anggaran neto di lingkungan Direktorat SMA tahun 2021 adalah 98,03%. Perhitungan realisasi tersebut telah memperhitungkan dana yang tidak terserap dan pengembalian LS yang telah diajukan. Ketidakterserapan dana diakibatkan pandemi covid 19 yang membuat beberapa kegiatan menjadi tidak terlaksana dan juga perubahan mekanisme dari luring menjadi campuran akibat ketidakhadiran peserta kegiatan. Ketidakhadiran peserta kegiatan juga berpengaruh terhadap pengembalian LS yang telah diajukan oleh bendahara sehingga menurunkan realisasi anggaran neto

Berkaitan dengan pandemi Covid 19 yang masih terjadi, Direktorat SMA melakukan efisiensi yang ditujukan untuk penanganan Covid 19 di Indonesia. Total efisiensi yang digunakan menangani pandemi Covid 19 sebesar Rp. 48.292.929.000 dengan rincian sebagai berikut:

Peruntukan Refocusing	Jumlah Anggaran
Refocusing Kuota Internet Kemdikbud	4.764.000.000
Penanganan Pandemi COVID sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-408/MK.02/2021 tanggal 18 Mei 2021	4.100.000.000
Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga Tahun 2021 dalam rangka Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang tertuang dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-584/MK.02/2021	24.199.838.000
Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga Tahun 2021 dalam rangka penanganan kesehatan dan perlindungan sosial kepada masyarakat sebagai dampak pelaksanaan PPKM Darurat yang tertuang dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-629/MK.02/2021 tanggal 20 Juli 2021	12.655.410.000
Refocusing anggaran Belanja Operasional dan/atau Belanja non operasional dalam rangka pemenuhan Tunjangan Profesi Guru (TPG), Tunjangan Khusus Guru (Non PNS), Beasiswa Unggulan, Kuota Data, Tunjangan Fungsional Widyaprada dan Belanja Operasional (002) Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen	2.573.681.000
<b>Total</b>	<b>48.292.929.000</b>

Selain penanganan terkait pandemi, Direktorat SMA juga melakukan realokasi secara internal untuk mendukung program prioritas. Total anggaran yang di realokasi secara internal sebesar Rp.34.031.091.000 dengan rincian sebagai berikut:

Peruntukan Realokasi	Jumlah Anggaran
Pengadaan Buku Kurikulum Paradigma Baru Untuk Sekolah Penggerak Kelas 10	13.971.300.000
Pelatihan Proktor AN	9.900.000.000
Pelatihan Penggunaan Chromebook (Pemberian Bantuan Pemerintah)	10.159.791.000
<b>Total</b>	<b>34.031.091.000</b>

# BAB 4

## PENUTUP

- » Kesimpulan umum
- » Permasalahan
- » Rencana Aksi



# Kesimpulan Umum

Secara umum target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2021 telah tercapai dengan ringkasan berikut

## SK Tersedianya Layanan Pendidikan Sekolah Menengah Atas yang Merata dan Berkualitas

Kode	Indikator Kinerja	Satuan	2021			Sumber Data 2021
			Target PK 2021 (Lakip)	Capaian 2021	Persentase Capaian	
IKK	Jumlah kab/kota dengan APK SMA/MA/SMLB sekurang-kurangnya 95%	Kab/Kota	229	303	132.31%	Pusdatin
IKK	Jumlah SMA yang menjadi Sekolah Penggerak	Sekolah	374	381	101.87%	Ditjen PAUDDasmen
IKK	Persentase SMA yang memiliki nilai kinerja sekolah (scorecard) minimal 75 (kategori Sangat Tinggi)	%	5.00	45.35	907.00%	Ditjen PAUDDasmen
IKK	Persentase siswa SMA dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum	%	55.00	57.93	105.33%	BSKAP
IKK	Persentase siswa SMA dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	%	10.00	27.40	367.40%	BSKAP
IKK	Persentase SMA yang menggunakan peralatan TIK (komputer) dalam proses pembelajaran	%	76.06	76.06	127.70%	Dapodik
IKK	Persentase SMA yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	%	35.00	35.00	274.31%	BSKAP
IKK	Persentase data pokok pendidikan SMA yang akurat, terbaru dan berkelanjutan	%	95.10	95.20	104.02%	Dapodik

Jika melihat capaian IKK pada Sasaran Kegiatan tersedianya layanan pendidikan sekolah menengah atas yang merata dan berkualitas maka semua IKK telah tercapai dan melebihi target yang telah ditetapkan. Namun, walaupun capaian pada IKK telah melebihi target, perbaikan khususnya terkait peningkatan mutu pembelajaran harus terus dilakukan agar literasi, numerasi, dan karakter peserta didik dapat terus meningkat sesuai dengan cita-cita pendidikan.

## SK 2 – Menguatnya tata Kelola dan sistem pengendalian manajemen di lingkungan Ditjen Paud Dikdas Dikmen

Rata-rata predikat SAKIP  
Satker minimal BB

Target :

**A**

Realisasi :

**A**

Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas  
Pelaksanaan RKAKL masing-masing  
Satker minimal 80

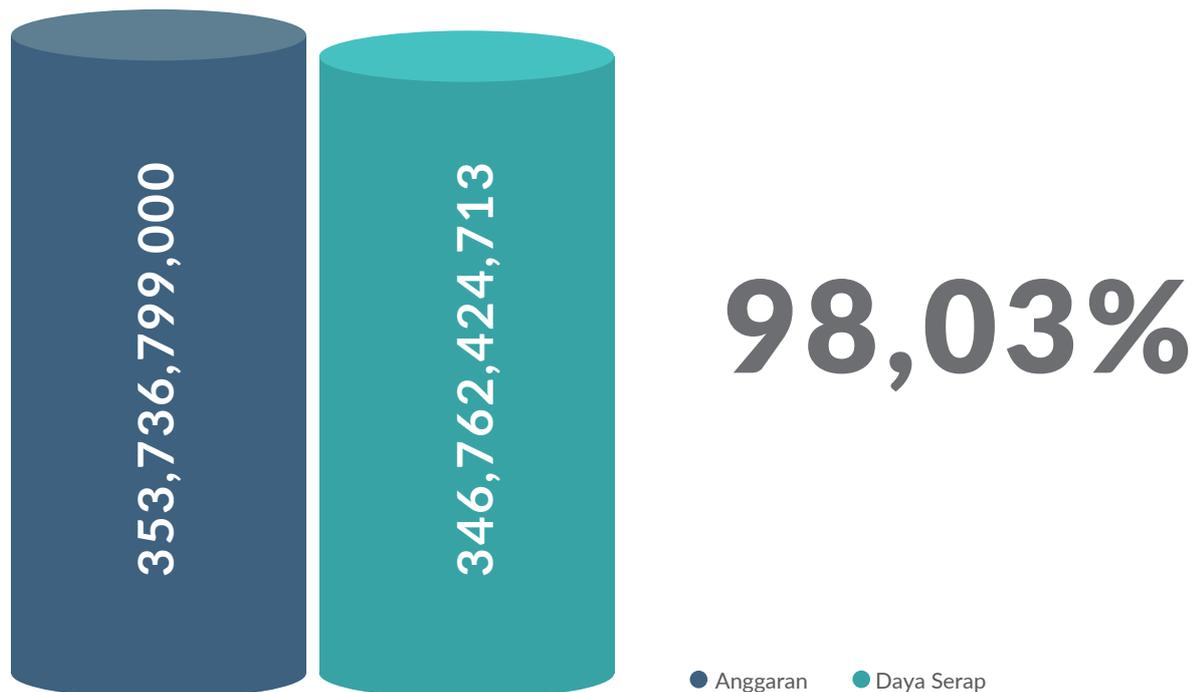
Target :

**82**

Realisasi :

**88,34**

### Penyerapan Anggaran



Pada Sasaran Kegiatan 2 yakni menguatnya tata kelola dan sistem pengendalian manajemen di lingkungan Ditjen Paud, Dikdas, dan Dikmen untuk capaian IKK telah tercapai semua. Terdapat IKK yang melebihi target yang ditetapkan yakni nilai kinerja anggaran. Untuk predikat sakip, walaupun secara predikat tetap sama, namun untuk nilai mengalami kenaikan.

# Permasalahan

- ▶ Masih diperlukan penguatan pemahaman pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat terhadap kebijakan dan program Kemendikbudristek seperti kebijakan merdeka belajar, program sekolah penggerak, fleksibilitas penggunaan dana BOS, pembelajaran paradigma baru, hingga tujuan dan konsep dasar dari pelaksanaan Asesmen Nasional.
- ▶ Potensi terjadinya *learning loss* akibat pandemic Covid 19 yang menyebabkan kualitas pembelajaran menjadi tidak optimal.
- ▶ Masih diperlukan penguatan tata Kelola pendidikan sehingga mempengaruhi hasil pembelajaran peserta didik. Salah satu yang perlu diperhatikan adalah pemahaman terkait kebijakan baru bagi seluruh Sumber Daya Manusia di lingkungan Direktorat SMA.
- ▶ Meningkatnya tingkat anak putus sekolah dan rentan putus sekolah baik akibat pandemi Covid-19 maupun faktor lainnya.
- ▶ Efisiensi anggaran yang dilakukan mengakibatkan terjadinya perubahan pola pelaksanaan kegiatan dari tatap muka menjadi campuran antara luring dan daring yang belum optimal, sehingga informasi yang ingin disampaikan kepada *stakeholder* Pendidikan menjadi belum terpenuhi.
- ▶ Terkait dengan masalah akses, berdasarkan data pada Dapodik terdapat 873 kecamatan atau setara 12% dari total kecamatan yang belum memiliki sekolah menengah baik SMA maupun SMK. Kondisi ini dapat mengganggu pelaksanaan program PPDB yang memiliki tujuan untuk memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh peserta didik untuk memperoleh pendidikan.
- ▶ Terjadinya kesenjangan kualitas pembelajaran berdasarkan hasil literasi, numerasi, dan juga lingkungan kondusif untuk peningkatan karakter peserta didik.
- ▶ Terkait dengan kebutuhan unit sekolah baru masih belum teranggarkan pada tahun 2021 sehingga jumlah kecamatan yang belum memiliki SM masih belum teratasi.
- ▶ Masih diperlukan harmonisasi pemahaman terkait kebijakan baru antar lintas unit di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

# Rencana Aksi

- ▶ Fasilitasi dan advokasi untuk peningkatan pemahaman pemerintah daerah, sekolah dan masyarakat melalui advokasi dengan menggunakan berbagai metode seperti sosialisasi tatap muka, penggunaan media, hingga pemanfaatan media sosial.
- ▶ Fasilitasi dan advokasi kepada pemerintah daerah dengan tujuan untuk meningkatkan kontribusi pemerintah daerah untuk dapat berkontribusi terhadap pelaksanaan pembelajaran selama masa pandemi dengan memperhatikan kondisi dan kebutuhan sekolah.
- ▶ Mewujudkan terciptanya kerja sama dan kolaborasi yang erat antar unit kerja di lingkungan Kemendibudristek dan pemangku kepentingan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, masyarakat, dan keluarga melalui penguatan tata Kelola Pendidikan yang partisipatif, akuntabel, dan transparan.
- ▶ Fasilitasi dan advokasi kepada pemerintah daerah dan sekolah untuk mendorong terciptanya inovasi yang berkontribusi untuk mengatasi anak putus sekolah dan rentan putus sekolah melalui kolaborasi bersama antara pemerintah daerah, sekolah, dan *stakeholder* pendidikan lainnya.

# LAMPIRAN



## Perencanaan Kinerja Akhir

#	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2021
1	[SK 1] Tersedianya layanan pendidikan SMA yang merata dan berkualitas	[IKK 1.1] Jumlah kab/kota dengan APK SMA/MA/SMLB sekurang-kurangnya 95%	229
		[IKK 1.2] Jumlah SMA yang menjadi Sekolah Penggerak	374
		[IKK 1.3] Persentase SMA yang memiliki nilai kinerja sekolah (scorecard) minimal 75 (kategori Sangat Tinggi)	5
		[IKK 1.4] Persentase siswa SMA dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum	55
		[IKK 1.5] Persentase siswa SMA dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	10
		[IKK 1.6] Persentase SMA yang menggunakan peralatan TIK (komputer) dalam proses pembelajaran	76,06
		[IKK 1.7] Persentase SMA yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	35
		[IKK 1.8] Persentase data pokok pendidikan SMA yang akurat, terbaru dan berkelanjutan	95,1
2	[SK 2] Menguatnya tata kelola dan sistem pengendalian manajemen di lingkungan Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen	[IKK 2.1] Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	A
		[IKK 2.2] Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKAKL masing-masing Satker minimal 80	82

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	5627	Pembinaan Sekolah Menengah Atas	Rp211.690.054.000
2	4462	Peningkatan Kualitas Pembelajaran Sekolah Menengah Atas	Rp116.938.529.000
3	2005	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	Rp25.108.216.000
<b>TOTAL</b>			<b>Rp353.736.799.000</b>

## Pengukuran Kinerja

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
[SK 1] Tersedianya layanan pendidikan SMA yang merata dan berkualitas	[IKK 1.1] Jumlah kabupaten/kota dengan APK SMA/MA/SMLB sekurang-kurangnya 95%	229	303	132.31%
	[IKK 1.2] Jumlah SMA yang menjadi Sekolah Penggerak	374	381	101.87%
	[IKK 1.3] Persentase SMA yang memiliki nilai kinerja sekolah (scorecard) minimal 75 (kategori Sangat Tinggi)	5	45,35	907.00%
	[IKK 1.4] Persentase siswa SMA dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum	55	57.93	105.33%
	[IKK 1.5] Persentase siswa SMA dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	10	36.74	367.40%
	[IKK 1.6] Persentase SMA yang menggunakan peralatan TIK (komputer) dalam proses pembelajaran	76,06	97.13	127.70%
	[IKK 1.7] Persentase SMA yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	35	96.01	274.31%
	[IKK 1.8] Persentase data pokok pendidikan SMA yang akurat, terbaru dan berkelanjutan	95,1	98.92	104.02%
[SK 2] Menguatnya tata kelola dan sistem pengendalian manajemen di lingkungan Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen	[IKK 2.1] Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	A	A	100%
	[IKK 2.2] Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKAKL masing-masing Satker minimal 80	82	88.34	107.73%

## Realisasi Anggaran SP2D SPAN Tahun 2021

No	Nama Kegiatan / KRO / RO	Volume				%Progres Pekerjaan	Anggaran	
		Target	Capaian	%	Satuan		Realisasi SP2D (SPAN)	%
<b>1</b>	<b>[2005] Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah</b>			<b>48,03</b>		<b>86,98</b>	<b>24.645.477.910</b>	<b>98,2</b>
1.1	[2005.EAA] Layanan Perkantoran	2	2	100	Layanan	86,31	19.786.572.816	97,8
1.1.1	[2005.EAA.001] Gaji dan Tunjangan	1	1	100	Layanan	86		
1.1.2	[2005.EAA.002] Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1	1	100	Layanan	87		
1.2	[2005.EAC] Layanan Umum	1	1	100	Layanan	93	3.376.130.234	99,6
1.2.1	[2005.EAC970] Dukungan Manajemen Satker	1	1	100	Layanan	93		
1.3	[2005.EAD] Layanan Sarana Internal	149	149	100	unit	82,37	1.482.774.860	99,4
1.3.1	[2005.EAD.996] Layanan pengadaan alat Pengolah Data dan Komunikasi	134	134	100	unit	74		
1.3.2	[2005.EAD.997] Layanan Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	15	15	100	unit	100,58		
<b>2</b>	<b>[4462] Peningkatan Kualitas Pembelajaran Sekolah Menengah Atas</b>			<b>100,2</b>		<b>100</b>	<b>110.878.819.096</b>	<b>94,8</b>
2.1	[4462.BDB] Fasilitas dan Pembinaan Lembaga	650	690	106,2	Lembaga	100	11.602.167.493	93,9
2.1.1	[4462.BDB.433] SMA yang Melaksanakan Program UKS	650	690	106,2	Lembaga	100		
2.2	[4462.QDB] Fasilitas dan Pembinaan Lembaga	17.081	17.081	100	Lembaga	100	99.276.651.603	94,9
2.2.1	[4462.QDB.431] SMA yang Mendapatkan Penguatan Ekstrakurikuler	650	650	100	Lembaga	100		
2.2.2	[4462.QDB.432] SMA yang Mendapatkan Pembinaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	13.939	13.939	100	Lembaga	100		
2.2.3	[4462.QDB.434] SMA yang Mendapatkan Pembinaan Kinerja (Scorecard)	650	650	100	Lembaga	100		
2.2.4	[4462.QDB.435] SMA yang Mendapatkan Pembinaan Asesmen Kompetensi	650	650	100	Lembaga	100		
2.2.5	[4462.QDB.436] SMA Penggerak yang Mendapatkan Pendampingan	382	382	100	Lembaga	100		
2.2.6	[4462.QDB.438] SMA yang Menerapkan Kurikulum yang Berlaku	810	810	100	Lembaga	100		
<b>3</b>	<b>[5627] Pembinaan Sekolah Menengah Atas</b>			<b>100,5</b>		<b>100</b>	<b>211.235.087.578</b>	<b>99,8</b>
3.1	[5627.BDB] Fasilitas dan Pembinaan Lembaga	750	750	100	Lembaga	100	80.957.183.138	99,7
3.1.1	[5627.BDB.403] SMA Aman Bencana	750	750	100	Lembaga	100		
3.2	[5627.QDB] Fasilitas dan Pembinaan Lembaga	34	43	126,5	Lembaga	100	4.551.617.335	98,4
3.2.1	[5627.QDB.405] SMA yang Mendapatkan Pembinaan Afirmasi	34	43	126,5	Lembaga	100		
3.3	[5627.RAA] Sarana Bidang Pendidikan	1.195	1.195	100	Paket	100	125.726.287.105	99,9
3.3.1	[5627.RAA.406] SMA yang Mendapatkan Bantuan Peralatan Pendidikan	1.195	1.195	100	Paket	100		
<b>TOTAL</b>				<b>99,85</b>		<b>99,08</b>	<b>346.759.384.584</b>	<b>98,03</b>



DIREKTORAT SMA  
DIREKTORAT JENDERAL PAUD. DIKDASMEN.  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI.

